SURAT KETERANGAN PENGECEKAN SIMILARITY

Saya yang bertandatangan di bawahini

Nama	: Ari Dwiputra Dirham
Nim	: 06041281520073
Prodi	: Pendidikan Sejarah
Fakultas	: KeguruandanIlmuPendidikan

Menyatakan bahwa benar hasil pengecekan similarity Skripsi/Tesis/Disertasi/Lap. Penelitian yang bejudul Perkembangan Surat Kabar Harian Pos Kota Di Kota Jakarta Tahun 1970-2000 adalah 20 %.Dicekoleh operator *:

1. DosenPembimbing
2. UPT Perpustakaan
3. OperaturFakultas……

Demikianlah surat keterangan ini saya buat dengan sebenarnya dan dapat saya pertanggung jawabkan.

Indralaya, 04 Agustus 2020

Menyetujui
Dosenpembimbing,

Dra. Yunani Hasan, M.Pd
NIP 195603101986032005

Yang menyatakan,

Ari Dwiputra Dirham
06041281520073

*Lingkari salah satu jawaban tempatan damelakukanpengecekan Similarity

Dipindai dengan CamScanner

Perkembangan Surat Kabar Harian Pos Kota Di Kota Jakarta Tahun 1970-2000

by Ari Dwiputra Dirhan

Submission date: 11-Dec-2019 02:29PM (UTC+0700)
Submission ID: 1232177871
File name: urat_Kabar_Harian_Pos_Kota_Di_Kota_Jakarta_Tahun_1970-2000..docx (82.15K)
Word count: 11104
Character count: 82065

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara harfiah terminologi pers bersumber dari bahasa Belanda yakni persen ataupun dari bahasa Inggris press memiliki makna menekan yang merujuk pada mesin cetak kuno yang harus ditekan secara keras agar menghasilkan karya cetak di dalam lembaran kertas (Edy Susanto,2010:19)

Pers memiliki pengertian luas dan sempit secara pengertian luas pers meliputi seluruh media komunikasi massa, seperti TV, Film, Radio yang memiliki fungsi menyebarkan berita, ide, gagasan dan pikiran sekelompok orang dan individu kepada orang lain (Taufik,1997:7-8). Secara pengertian sempit pers hanya meliputi produk yang melalui proses penerbitan cetak seperti surat kabar harian, majalah, buletin yang dapat disebut sebagai media cetak (F. Rachmadi,1990:9-10).

Pers pribumi memiliki berbagai macam bahasa yakni Jawa, Melayu, dan bahasa lainnya yang dipakai dalam beberapa surat kabar (Pramoedya Ananta Toer,1985:23)

Orde Baru muncul diawali dengan runtuhnya rezim presiden Soekarno dan digantikan dengan rezim presiden Soeharto. Pada masa awal kepemimpinan presiden Soeharto pers diberikan kebebasan untuk ruang berpikir dan mengeluarkan aspirasi terhadap kebijakan pemerintah Orde Lama.

Harmoko setelah tidak lagi bekerja di Harian Merdeka. Harmoko sering diskusi dengan tokoh-tokoh pers yang tergabung di Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jakarta sebut saja, S. Abijasa, S. Harsono dan beberapa tokoh pers lainnya. Memberikan gagasan, ide dan sebuah rencana untuk membuat surat kabar harian yang berbeda dari yang sudah beredar. Karena pada masa itu surat kabar harian cenderung sangat politis dan tidak independen. Pada saat itu Harmoko menginginkan surat kabar popular newspaper yakni koran populer dan pasarnya untuk kalangan menengah kebawah. Berita yang disajikan juga menggunakan bahasa yang sangat mudah dipahami oleh kalangan menengah kebawah dan surat kabar tersebut disisipi foto serta

gambar-gambar peristiwa yang ada di Jakarta. Sesuai dengan keinginan para pendiri Pos Kota (Ghazali & Nasution,2000:1)

Rosihan Anwar membedakan antara popular newspaper dan quality newspaper yakni quality newspaper adalah surat kabar yang mengedepankan kualitas isi berita dan biasanya di konsumsi oleh kalangan menengah keatas sedangkan popular newspaper adalah surat kabar yang mengangkat isu-isu rakyat biasa dan biasanya yang menjadi menikmati koran popular newspaper adalah kalangan menengah kebawah.

Kebebasan pers hakikatnya adalah kebebasan masyarakat untuk memilih media pers mana yang ingin ia baca sesuai dengan minat dan hobi masyarakat tersebut. Kebebasan dapat menyalurkan pendapat,kritik, dan keluhan melalui media pers. Serta masyarakat dapat mendapatkan informasi yang tidak terbatas (Atmakusumah,2009:53).

Rencana pun diwujudkan setelah sekian lama mengendap dan kemudian para pendiri Pos Kota membentuk sebuah yayasan dengan nama Antar Kota pada 5 Februari 1970. Tujuan dari yayasan tersebut dibentuk yakni mengembangkan usaha penerbitan dan menerbitkan buku-buku maupun karya sastra yang mudah dimengerti masyarakat. Serta diharapkan yayasan ini bisa menjadi wadah karya seni baik dari pementasan acara mau sebagai memperoduksi acara, pameran seni rupa, dan pembuatan film. Dan pendiri yayasan terdiri dari Yachya Suryawinata, Harmoko, Tahar, S. Abijasa, S. Harsono. Dan Pansa Tampubolon (Ghazali & Nasution,2000:2-3)

Pos Kota itulah surat kabar yang besar pada masanya koran lokal pertama yang mengalahkan oplah koran nasional Kompas dengan lebih dari 500.000 eksemplar/hari pada tahun 2005 dikutip dari Majalah Cakram. hal ini bisa terjadi bukan hanya Pos Kota memiliki sistem pemasaran yang hebat namun ditopang juga oleh masyarakat menengah kebawah yang juga haus dengan bacaan yang mudah dimengerti dan dipahami dengan tata bahasa tidak baku dan layout yang seperti atraksi sirkus tidak terpola dan dengan gambar yang tumpang tindih menggunakan kalimat – kalimat bombastis dan sensual. Pos Kota juga sebagai pelopor korang kuning juga sangat menarik perhatian karena pada masa sebelum tahun 1970-an di Jakarta dan bahkan Indonesia pada umumnya.

Menurut Kusumaningrat (2005:67) Berita-berita koran kuning biasanya hanya berkisar masalah seks, kriminalitas, sensasional dan istilah key hole news yakni berita tentang hasil mengintip rumah tangga orang lain yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan umum. Koran kuning selalu mengandalkan berita yang tengah heboh dimasyarakat dengan judul berita yang penuh bombastis, kehebohan, hingga dramatisir untuk menjadi headline di halaman pertama koran tersebut. Ini didasari semata mata untuk menaikan tiras koran itu sendiri tetapi juga tidak mengurangi berita yang ingin disampaikan koran tersebut. Ciri khas koran-koran kuning di Indonesia judul berita halaman pertama menjadi daya tarik agar pembaca membuka halaman selanjutnnya. Serta tata letak pemberitaan cenderung berdempetan.

Masyarakat Jakarta sendiri terdiri dari berbagai macam suku yang ada di seluruh Indonesia yang melakukan Urbanisasi ke Jakarta. Sehingga Jakarta bisa juga dikatakan sebagai tempat kaum urban dari berbagai seluruh wilayah di Indonesia. Urbanisasi sendiri didefinisikan sebagai masyarakat yang awalnya berasal dari desa lalu pindah ke kota ataupun proses terbentuknya masyarakat perkotaan (Soekanto, 2010: 140).

"*Sebelum saya datang ke Jakarta saya berpikir seperti kamu. Saya bermimpi bahwa saya akan melakukan hal-hal besar,yang akan membuat saya setara dalam badan dan pikiran terhadap kesempatan-kesempatan yang akan saya temui. Mungkin kamu lebih beruntung dari pada saya. Angin berembus di provinsi itu membisikkan bahwa seseorang tidak akan sepenuhnya sebagai orang Indonesia bila ia belum melihat Jakarta*"

(Pramoedya Ananta Toer,"Letter to a Friend," 1995)

Kutipan diatas diambil dari buku Abidin Kusno (2009:38). Mengisyaratkan bahwa Jakarta sebagai pusat yang sangat berperan penting memberikan harapan baru sebagai tempat merubah nasib menjadi lebih baik. Menciptakan hal-hal utopis bahwa apapun yang akan kita lakukan ke Jakarta akan menjadi sesuatu yang lebih baik. Akibat dari gencarnya arus Urbanisasi di Jakarta timbul juga masalah-masalah baru perkotaan mulai dari potret kemiskinan, kelaparan,sengketa lahan, kriminalitas.

Kehadiran surat kabar Pos Kota di tengah masyarakat Jakarta telah memberikan pengaruh yang luar biasa dalam penyebaran informasi hal ini dapat dilihat sejak

lahirnya Pos Kota yang menjadi penghubung tersampainya masalah yang ada di masyarakat ibukota. Dari Kelahiran Pos Kota pada tahun 1970 sampai saat skripsi ini ditulis Pos Kota tetap konsisten menyampaikan berita-berita sosial yang dekat dengan masyarakat. Ini dikarenakan sesuai dengan motto Pos Kota "Harian Independent" dimana Pos Kota sendiri cenderung menjadi surat kabar yang netral dan apa adanya. Demikianlah peneliti memutuskan mengambil judul **"**Perkembangan Surat Kabar Harian Pos Kota Di Jakarta 1970-2000**"**

1.2 . Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti menyimpulkan rumusan masalahnya adalah

1. Bagaimana latar belakang berdirinya surat kabar harian Pos Kota ?
2. Bagaimana proses berdiri surat kabar harian Pos Kota ?
3. Bagaimana perkembangan surat kabar harian Pos Kota dari tahun 1970-2000?

1.3. Batasan Masalah

Agar pembahasan ini tidak keluar dari konteks dan tidak terjadi kerancuan dan dapat diuraikan secara sistematis maka dalam penulisan penelitian ini perlu adanya batasa masalah. Oleh karena itu dalam penelitian ini perlu dibatasi ruang lingkup kajiannya, meliputi:

1.3.1. Skup Tematikal

Skup ini merupakan batasan agar dalam penulisan tidak keluar dari tema atau permasalahan yang teah ditetapkan sebelumnya. Dalam penulisan ini peneliti mengambil tema tentang sejarah pers dan yang dibahas dalam penulisan ini adalah Perkembangan Surat Kabar Harian Pos Kota 1970-2000. Dalam penelitian ini penulis mengarahkan penelitian hanya pada perkembangan surat kabar harian Pos Kota dari awal terbentuk hingga meraih kesuksesan sebagai sebagai lokal koran terbesar di Indonesia.

1.3.2. Skup Spasial

Skup Spasial dalam penelitian ini yaitu mengadakan pembatasan wilayah yang menjadikan objek peristiwa yang terjadi. Dalam penulisan ini untuk wilayahnya adalah adalah sekitar Jakarta sesuai dengan pemasaran koran Pos Kota itu sendiri

1.3.3. Skup Temporal

Skup Temporal yaitu berhubungan dengan kurun waktu atau kapan peristiwa itu terjadi. Dalam penulisan ini peneliti mengambil kurun waktu dari awal masa Orde Baru hingga awal Reformasi pada tahun 1970 sampai tahun 2000. Agar mendapat gambaran bagaimana Pos Kota selama 30 tahun terakhir konsisten dan tetap eksis.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui hadirnya surat kabar Pos Kota di Jakarta
2. Untuk menambah khazanah pengetahuan kita tentang Pers
3. Untuk syarat sebagai penyelesaian tugas akhir

1.5. Manfaat Penelitian

Setelah membaca skripsi ini diharapkan pembaca dapat:

1. Mengetahui Perkembangan Pos Kota di daerah Jakarta
2. Dapat memperoleh gambaran tentang dampak krisis moneter melalui tajuk wacana Pos Kota
3. Diharapkan pembaca memahami jalannya transisi orde baru menuju reformasi dari media massa dan dampak masyarakat pada masa itu khususnya Pos Kota

1.6. Ruang Lingkup Penelitian

Agar dalam penelitian ini tidak terlalu meluas dan tetap terfokus pada permasalahan yang akan di angkat maka penulis membatasi diri pada dua lingkupnya. Ruang lingkup yang pertama yakni lingkup spasialnya dan temporal.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Pers

Pers berasal dari bahasa inggris yakni *Press*, memiliki beberapa pengertian, Pers mencakup semua media komunikasi massa. Dalam pengertian sempit, Pers hanya digolongkan produk-produk penerbitan melalui proses percetakan yang di kenal sebagai media cetak. Pers dalam pengertian luas merupakan manifestasi dari *Freedom of Speech*, sedangkan dalam pengertian sempit merupakan dari *Freedom of the Press*, yang keduanya tercangkup dalam *Freedom of exression* (F.Rachmadi, 1990:9).

Jika kita membicarakan pers tidak akan bisa lepas dengan jurnalistik. Jurnalistik adalah kegiatan. Secara harfiah, jurnalistik berarti kewartawanan atau kepenulisan di ambil dalam bahasa inggris yakni Journal yang berarti catatan atau laporan. Bisa juga dari bahasa prancis yakni jour yang berarti hari (Rahman, 2015:3).

Pers merupakan sarana bagi masyarakat untuk dapat mengeluarkan pemikiran pemikiran serta memberikan informasidan pemberitan bagi masyarak at. Pers yang bebas dan bertanggung jawab amat berperan penting dalam kecerdasan masyarakat dalam negara yang demokratis. Negara demokratis adalah negara yang menjamin kebebasan pers dalam kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai mana terkandung dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 33, disebutkan mengenai fungsi pers dalam hal ini pers nasional. Adapun fungsi pers nasional adalah sebagai berikut:

1. Sebagai wahana komunikasi massa. Pers nasional sebagai sarana berkomu nikasi antarwarga negara, warga negara dengan pemerintah, dan antar berbagai pihak
2. Sebagai penyebar informasi. Pers nasional dapat menyebarkan informasi baik dari pemerintah atau negara kepada warga negara (dari atas ke bawah) maupun dari warga negara ke negara (dari bawah ke atas)

3. Sebagai pembentuk opini. Berita, tulisan dan pendapat yang dituangkan melalui pers dapat menciptakan opini kepada masyarakat luas. Opini terbentuk melalui berita yang disebarkan lewat pers
4. Sebagai media informasi,pendidikan , hiburan, dan kontrol serta sebagai lembaga ekonomi

Dengan terjaminnya kemerdekaan masyarakat dalam mendapatkan informasi dan berita, maka masyarakat dapat memberikan pemikiran-pemikirannya. surat kabar adalah media komunikasi massa yang memuat serba serbi pemberitaan, meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan. Fungsinya sebagai penyebar informasi pendidikan,menghibur, mengawasi ataur mengatur massa (Gunadi,1998:83). Adapun karakteristik dari surat kabar yakni:

1. Publisitas

   Penyebaran pesan kepada publik
2. Periodesitas

   Keteraturan terbit.
3. Universalitas

   Menyampaikan pesan yang beragam, dan dapat diakses secara umum
4. Aktualitas

   Baru saja terjadi atau sedang terjadi, untuk setiap media bersifat relatif karena tergantung periodesitas media missal surat kabar pagi,atau surat kabar sore.
5. Terdokumentasi (Bisa diarsip)
6. Faktualitas (Sesuai dengan fakta)

Jenis surat kabar umum biasanya diterbitkan setiap hari, kecuali pada hari-hari libur, Surat kabarsore juga banyak di beberapa negara. Selain itu, juga terdapat surat kabar mingguan (*Weekly Newspaper*) yang biasanya lebih kecil dan kurang prestisius dibandingkan dengan surat kabar harian (*Daily Newspaper*) dan isinya biasanya lebih bersifat umum dan hiburan.

Dalam penerbitan sebuah surat kabar, biasanya terdiri dari beberapa bagian ataupun devisi yang bertanggung jawab langsung maupun tidak langsung terhadap

sebuah penerbitan sebuah surat kabar, adapun susunan tim dalam sebuah redaksi surat kabar adalah sebagai berikut:

1. Penanggung jawab surat kabar

   Yakni pimpinan dari lembaga penerbit surat kabar.

2. Pemimpin Redaksi

   Adapun salah satu dari tim redaksi yang bertugas mengajak/memimpin rapat redaksi untuk menentukan tema dan topik-topik tulisan setiap edisi surat kabar.

3. Tim Redaksi

   Merupakan beberapa orang (2-3 orang atau lebih) yang bertugas menseleksi, mengolah dan menyunting tulisan yang masuk agar cocok untuk dimuat surat kabarnya (dari segi topik dan panjang tulisan). Tim redaksi juga menjadi reporteryang mencari bahan tulisan dan narasumber untuk ditulis sesuai kebutuhan materi sebuah edisi surat kabar. Serta melakukan pemotretan dan mengumpulkan/menyusunnya menjadi stok foto yang sewaktu-waktu siap digunakan.

4. Tim Reporter

   Wartawan lapangan yang bekerja untuk mencari berita di lapangan, mewawancarai seseorang, dan membuat tulisan hasil lapangan/wawancara tersebut. Hasil laporannya kemudian diolah (diedit) tim redaksi menjadi tulisan yang siap dimuat. Selain itu, reporter juga melakukan pemotretan yang diperlukan

5. Lay-outer/type setter

   Orang yang bertugas melakukan tataletak (lay-out) naskah, gambar, dan bagian-bagian lain di dalam surat kabar dan tata aksara (setting) yaitu pemilihan jenis dan ukuran huruf yang sesuai dengan kebutuhan (jelas dan artistik)

6. Ilustrator

   Orang yang membuat gambar ilustrasi untuk melengkapi suatu naskah (cerita/catatan pengalaman, cerpen, puisi, dan sebagainya).

7. Kontributor Tulisan

Seseorang yang punya kepandaian menulis tetapi tidak masuk ke dalam struktur organisasi media. Beberapa orang seperti ini dapat diperoleh dari jenis keahlian (Kompetensi) tertentu. Juga terdapat perorangan yang memang merupakan pemerhati dan bersedia menuliskan hasil pengamatanya/pemikirannya

2.2. Tinjauan Umum Tentang Pers

2.2.1 Pers Pada Masa Belanda

Percetakan di Indonesia bermula pada kedatangan Belanda di kepulauan Nusantara. Pertumbuhan dan perkembangannya berjalan sejajar dengan ekspansi bertahap kolonialisme Belanda. *Verenigde Nederlandsche Geoctroyeerde Oost-Indische Compagnie* (VOC), mulai menyadari manfaat percetakan untuk mencetak aturan hukum yang termuat dalam maklumat resmi pemerintah. Pengenalan percetakan ini juga diprakarsai oleh para misionaris Gereja Protestan Belanda yang menggunakannya untuk menerbitkan literatur Kristen dalam bahasa daerah untuk keperluan penginjilan (Adam,2004:1).

Para misionaris Gereja yang mula-mula berusaha memperkenalkan percetakan di Hindia Belanda pada 1624, namun karena tak ada tenaga terampil yang menjalankannya, mesin cetak akhirnya tidak digunakan sama sekali. Pengurus Gereja mengusulkan kepada pemerintah pusat Batavia mencari dan menugaskan seorang tenaga operator terampil dari Belanda, untuk memenuhi kebutuhan tenaga pencetak dalam menerbitkan kitab keagamaan dan traktat-traktat.

Upaya memperkenalkan percetakan tersebut tidak terwujud hingga 1659, sampai seorang bernama Kornelis Pijl memprakarsai percetakan dengan memproduksi sebuah *Tijtboek*, yakni sejenis almanak, atau "buku waktu" (Encyclopedia Indonesia,1990:88). Setelah itu tidak ada kegiatan percetakan hingga 1667, yaitu ketika pemerintah pusat berinisiatif mendirikan sebuah percetakan dan memesan alat cetak yang lebih baik. Produk pertama percetakan ini adalah Perjanjian Bongaya, dokumen ini dicetak oleh Hendrick Brant yang pada Agustus 1668 mendapat kontrak mencetak dan menjilid buku atas nama VOC (Adam,2004:2).

VOC menandatangani kontrak baru dengan Pieter Overtwater dan tiga pegawai Kompeni lainnya Setelah kontrak dengan Brant berakhir pada 16 Februari 1671.

Percetakan ini dinamakan *Boeckdrucker der Edele Compagnie*. Dalam perkembangan selanjutnya Andreas Lambertus Loderus, seorang mantan pendeta mengambil alih percetakan pada tahun 1699 untuk didayagunakan secara maksimal. Banyak karya penting dalam bahasa Belanda, Melayu, dan Latin-Belanda-Melayu yang disusun oleh Loderus sendiri.

Keberadaan percetakan pada tahun-tahun pertama abad ke-18 berperan penting di Hindia Belanda, yang digunakan untuk menghemat tenaga penulis pengganda. Dalam periode ini percetakan hanya mencetak dokumen dan buku-buku kompeni untuk para pegawainya dan tidak terlihat upaya menerbitkan surat kabar sampai sekitar 120 tahun setelah sebuah percetakan berdiri di Batavia (Adam,2004:3).

Surat kabar tercetak pertama lahir dari percetakan Benteng yang diberi nama *Bataviasche Nouveles*, di bawah pemerintahan Gubernur Jenderal Gustaaf Willem Baron Van Imhov, yang berhaluan liberal dan ingin meningkatkan kehidupan intelektual dan kebudayaan di Batavia. Surat kabar ini terbit dikelola oleh Jan Erdman Jordens, terbit mingguan dan telah mendapat izin awal selama tiga tahun dan mulai terbit tanggal 7 Agustus 1744. Para direktur pelaksana VOC di Amsterdam yang berjumlah 17 orang (De Heeren Zeventien) tidak senang melihat surat kabar ini, karena dianggap akan merugikan dan membahayakan kepentingan VOC. Sebelum izin tersebut berakhir, surat kabar ini harus berhenti terbit pada tanggal 20 Juni 1746 (Ensiklopedia,1990:88).

Usaha percetakan yang dikendalikan Dominicius berkembang menjadi usaha penerbitan dan menerbitkan surat kabar *Vendu Nieuws*, menjelang pembubaran VOC pada tanggal 31 Desember 1799. Surat kabar ini merupakan media iklan mingguan, terutama mengenai berita lelang koran ini dikenai sensor ketat dan harus menghentikan penerbitannya pada tahun 1809 masa pemerintahan Jenderal Herman Willem Deandels (1808-1811). Deandels membeli percetakan kota dan menggabungkannya dengan percetakan Benteng menjadi *Landsdrukkerij* (percetakan negara) yang masih terus bekerja sampai pemerintahan kolonial berakhir. Percetakan ini menerbitkan media resmi pemerintah untuk mempublikasikan reformasi permerintahan Deandels di Jawa.

Edisi pertama mingguan *Bataviasche Koloniale Courant* terbit pada 15 januari 1810 di Batavia.

Surat kabar yang ada pada abad ke-18 merupakan surat kabar resmi milik pemerintah. Satu-satunya percetakan Non-pemerintah adalah percetakan Misionaris yang digunakan untuk mempublikasikan kepustakaan dan penerjemahan injil serta katekisma-katekisma keagamaan, percetakan ini setelah pertengahan abad ke-19 memasuki dunia surat kabar (Adam,2004:8-11).

Percetakan milik swasta muncul pada abad ke-19, *Landsdrukkerij* menerbitkan *Bataviasch Advertentieblad* di Batavia pad tahun 1825. Surat kabar mingguan pertama terbit di Surabaya bernama *Soerabayasche Courant* pada tahun 1837 yang diterbitkan oleh C.F.Smith. setelah itu di Semarang juga terbit surat kabar mingguan sebagai media pengiklan dengan nama *Semarangsch Advertentieblad* pada tahun 1845 dicetak di percetakan *Oliphant & Co*.

Masuknya percetakan ke Indonesia juga merangsang tumbuhnya surat kabar berbahasa Belanda dikota-kota besar seperti Batavia, Surabaya, dan Semarang, yang mengakibatkan di umumkannya undang-undang pers pada tahun 1856. Undang-undang pers ini yang kemudian mendorong tumbuhnya pers berbahasa anak negeri di Indonesia, sebagai pelopor surat kabar nasional pertama yaitu "*Medan Priyayi*" dibawah pimpinan R.M. Tirto Adisuryo.

2.2.2 Pers Pada Awal Kemerdekaan

Pers pada pertengahan tahun 50-an akhir di indonesia banyak lahir sebagai corong dari kekuatan politik yang diusungnya baik dari golongan nasionalis, agama , komunis maupun tentara seperti *Suluh Indonesia* Pers besutan PNI (Partai Nasionalis Indonesia), *Harian Abadi* buatan Masyumi. *Duta Masyarakat* buatan Nadhlatul Ulama, *Harian Rakjat* dan *Warta Bakti* buatan PKI, Serta *Angkatan Bersenjata* milik Tentara Nasional Indonesia (TNI) hal inilah yang menyebabkan opini pers yang di anutnya serta perpanjangan tangan dari kekuatan politik pendukungnya sehingga terjadi persaingan dan unjuk gigi program kebijakan yang di usung oleh kekuatan – kekuatan politik tersebut pada masa itu muncul juga istilah "perang pena dan perang suara" (Andi Suwirta Sosiohumanika 2008)

Sebagai perbandingan Harian Abadi milik Masyumi serta Harian Rakjat milik PKI selalu bersaing ide dan gagasan di dalam tulisan – tulisan pers tersebut antara ideologi Komunis dan Agama. Harian Abadi sendiri dibentuk atas dasar menghimpun aspirasi umat islam pada tahun 1947 sedangkan Harian Rakjat sendiri sebenarnya bukan koran buatan PKI asli Harian Rakjat dibentuk oleh Siauw Giok Tjhan namun akibat tidak sanggup menampung beban operasional Harian Rakjat terpaksa dijual. PKI yang pada saat itu saat menginginkan corong media lalu membeli harian Rakjat pada tahun 1953 Harian Rakjat resmi menjadi milik PKI

Sebagai pers komunis, Harian Rakjat memiliki karakteristik khusus dibandingkan pers lainnya yakni Njoto sebagai Ketua bidang agitasi dan propaganda PKI, menekankan bahwa pers harus memiliki relasi yang kuat dengan massa rakyat. Pers harus menjadi corong suara bagi rakyat,manakala gerakan rakyat harus memaksimalkan kekuatan pers. Njoto juga menekankan pentingnya keterlibatan rakyat sebagai sumber berita sekaligus mendukung distribusi dan sirkulasi Harian Rakjat. (Zulfikar, 29:2018)

Harian Rakjat membuka keterlibatan para pembacanya untuk menuliskan opini di koran tersebut. Konten utama Harian Rakjat berisi berita seputar perkembangan masyarakat, khususnya kaum buruh. Selain itu, berita internasional terutam berita perkembangan komunisme di dunia internasional serta berita dengan topik ringan seperti beri olahraga juga ada dalam surat kabar ini (Zulfikar, 36-38:2018)

Di sisi lain, Harian Abadi sejak awal memang difungsikan sebagai organ resmi milik Masjumi. Masjumi sebelumnya telah memiliki sejumlah terbitan seperti majalah Hikmah. Terbitan tersebut sayangnya dirasa belum maksima sebagai corong suara partai. Hal tersebut melatarbelakangi pendirian Abadi pada tanggal 2 januari 1951 dengan slogan "Untuk Agama, Bangsa, dan Negara". Abadi memiliki sejumlah konten yang menarik pembaca seperti Tajuk Rencana dan Koran Pak Jenggot Selain itu, Abadi juga memuat pemberitaan mengenai islam sebagai agama maupun sebagai organisasi politik. Sebagai corong Masjumi, Abadi kerapkai menyerang musuh politik Masjumi seperti PNI ataupun PKI

Serangan pertama yang dilancarkan oleh PKI ketika mengkritik Perdana Menteri Soekiman yang menandatangani Mutual Security Act yakni bantuan ekonomi dari Amerika Serikat. Sehingga penandatanganan MSA oleh Soekiman dianggap melanggar prinsip politik luar bebas aktif.

Harian Abadi pun membalas serangan tersebut dengan memuat tulisan Natsir yang berusaha membongkar "wajah sejati komunis" yang dimaksud adalah paham anti agama. Selain itu pernyataan tokoh Masjumi lainnya, Mochtar Chazaly, yang dimuat dalam Harian Abadi menuduh jika pemasangan foto tokoh-tokoh komunis internasional seperti Mao Zedong atau Josef Stalin dalam acara-acara PKI merupakan indikasi jika partai tersebut merupakan antek Blok Timur.

Kendati demikian, kondisi tersebut menimbulkan persoalan tersendiri khusunya bagi pemerintah karena pemberitaan telah mengganggu kondusifitas dan stabilitas khususnya dibidang politik. Terkesan provokatif dan cenderung menyerang lawan politik. Itu bisa dibuktikan dan terlihat jelas pada judul judul headline koran waktu itu (Said, 1988:85-116)

2.2.3 Pers Pada Masa Demokrasi Liberal

Kehidupan pada tahun 1950/1960-an ditandai oleh munculnya kekuatan-kekuatan politik dari golongan nasionalis, agama, komunis dan tentara. Masing-masing kekuatan politik ini pada tahun 1950-an memiliki media untuk kepentingan mereka. Misalnya adalah surat kabar *Suluh Indonesia* milik PNI (Partai Nasional Indonesia), *Harian Abadi* milik Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia), *Duta Masjarakat* milik NU (Nahdatul Ulama), *Harian Rakjat* dan *Warta Bhakti* milik PKI (Partai Komunis Indonesia). Sedangkan pada tahun 1960-an TNI-AD (Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Darat) juga memiliki dan menerbitkan surat kabar seperti *Angkatan Bersendjata* dan *Berita Yudha.* Dalam konteks ini maka berita dan opini pers merupakan perpanjangan dari kebijakan dan program kekuatan politik yang mendukungnya. Persaingan dan pergumulan di antara kekuatan-kekuatan politik yang ada pada tahun 1950-an dan 1960-an itu juga tercermin dalam "perang pena dan perang suara" surat-surat kabar yang dimilikinya.

Selain terdapat pers partisan seperti di atas, ada juga pers yang relatif independen, dalam artian tidak memiliki ikatan formal dengan kekuatan politik tertentu. Namun ke dalam jenis pers semacam ini muncul sebutan *personal journalism*, yakni sebuah jurnalisme yang secara signifikan tampil di muka khalayak dengan suara dan sikap yang seirama dengan pikiran, pandangan dan idealisme pemimpin redaksinya (Suwirta, 2004:392). Contohnya adalah bahwa surat kabar *Merdeka, Indonesia Raya* dan *Pedoman* di Jakarta pada tahun 1950-an tidak bisa dipisahkan dari visi dan *policy* B.M. (Burhanuddin Muhammad) Diah, Mochtar Lubis, dan Rosihan Anwar (Atmakusumah, 1992:16-99; Said ed., 1992; dan Kakiailatu, 1997:135-145). Begitu juga dengan surat kabar di kota-kota penting lainnya di Jawa, seperti *Pikiran Rakjat* (Bandung), *Suara Merdeka* (Semarang), *Kedaulatan Rakjat* (Yogyakarta) dan *Surabaja Post* (Surabaya) jelas tidak bisa dipisahkan dari sosok-sosok pribadi Djamal Ali, Mohamad Hetami, Madikin Wonohito dan Abdul Azis (Soebagijo I.N., 1981:310-315; Hendrowinoto, 1985; Harsono, 1997:xv; dan Iskantini, 2002:77). Hal ini juga berlaku bagi pers yang terbit di luar Jawa, seperti surat kabar *Waspada* (Medan), *Haluan* (Padang) dan *Pedoman Rakjat* (Makasar) yang dalam banyak segi merupakan representasi dari pandangan dan kepentingan Mohamad Said atau Ani Idrus, Kasuma dan L.E. Manuhua (Sjahril & Sjureich, 1971:236 dan 249).

Tanpa harus mengabaikan anggota redaksi lainnya, peranan pimpinan redaksi dalam surat kabar itu sangat signifikan karena ia laksana nahkoda kapal yang bertanggung jawab terhadap arah perjalanan dan bahtera kehidupan awaknya. Ke mana saja arah kapal akan bergerak dan bagaimana cara menempuh perjalanan itu agar sampai pada tujuan yang diinginkan, nampaknya harus tetap dalam kerangka kebijakan dan pandangan dari nahkoda kapal tersebut (Gani, 1978:84).

Tentang tiras surat-surat kabar pada tahun 1950/1960-an nampaknya juga belum diperoleh data-data yang akurat. Jika tahun 1957 dianggap sebagai masa-masa puncak tiras pers Indonesia – hal ini disebabkan, antara lain, karena adanya nasionalisasi dan pensitaan terhadap pers berbahasa Belanda – maka jumlah surat kabar berbahasa Indonesia sebanyak 96 buah dengan tiras 1.022.000 eksemplar; surat

kabar Cina sebanyak 17 buah dengan tiras 130.000 eksemplar; serta terdapat beberapa surat kabar berbahasa Inggris seperti *Indonesian Observer* (pimpinan Herawati Diah) dan *TimeS of Indonesia* (pimpinan Charles Tambu) dengan tiras sekitar 25.000 eksemplar (Smith, 1986:168). Berikut ini merupakan tabel kondisi pers yang dinilai penting pada tahun 1950/1960-an, termasuk perkiraan jumlah tirasnya, dari berbagai sumber:

No	Nama Surat Kabar	Tempat dan Mulai Terbit	Perkiraan Jumlah Tiras
1.	Kabar Merdeka	Jakarta: 1 Oktober 1945	20.000 Eksemplar
2.	Berita Indonesia	Jakarta: September 1945	10.000 Eksemplar
3.	Pedoman	Jakarta: 29 Nopember 1948	48.000 Eksemplar
4.	Indonesia Raya	Jakarta: 29 Desember 1949	47.500 Eksemplar
5.	Indonesia Observer	Jakarta: 1 Oktober 1954	7.500 Eksemplar
6.	Times of Indonesia	Jakarta: 1952	5.000 Eksemplar
7.	Harian Abadi	Jakarta: 2 Januari 1950	34.000 Eksemplar
8.	Suluh Indonesia	Jakarta: 1953	40.000 Eksemplar
9.	Keng Po	Jakarta: 1947	39.000 Eksemplar
10.	Duta Masjarakat	Jakarta: 2 Januari 1954	15.000 Eksemplar
11.	Harian Rakjat	Jakarta: 1951	55.000 Eksemplar
12.	Pikiran Rakjat	Bandung: 1 Juni 1950	16.000 Eksemplar
13.	Sipatahunan	Bandung: 20 April 1923	15.000 Eksemplar
14.	Suara Merdeka	Semarang: 11 Februari 1950	5.000 Eksemplar
15.	Kedaulatan Rakjat	Yogyakarta: 27 September 1945	15.000 Eksemplar
16.	Harian Nasional	Yogyakarta: Desember 1945	7.500 Eksemplar
17.	Surabaja Post	Surabaya: 1 April 1953	15.000 Eksemplar
18.	Suara Rakjat	Surabaya : 1 Oktober 1945	14.000 Eksemplar
19.	Waspada	Medan: 11 Januari 1947	10.000 Eksemplar
20.	Haluan	Padang: 1 April 1948	7.500 Eksemplar

21.	Kalimantan Berdjuang	Banjarmasin: 1 November 1946	5.000 Eksemplar
22.	Pedoman Rakjat	Makassar: 1 Maret 1947	5.000 Eksemplar

2.3.1 Tinjauan Umum Surat Kabar Di Jakarta

Kota Jakarta merupakan Ibu Kota Indonesia yang memiliki perkembangan dan kemajuan yang sangat pesat diberbagai bidang dan sektor. Melihat pertumbuhan Kota Jakarta yang begitu cepat dan pesat yang dikarenakan oleh banyak faktor seperti pusat perkantoran, perdagangan, pemerintahan, bisnis, permukiman menyebabkan banyak masyarakat yang cenderung untuk mencari penghasilan di Jakarta. Kondisi seperti ini membuat kota Jakarta diserbu oleh para pendatang dan dengan jumlah yang terus meningkat tiap tahunnya sehingga menyebabkan kebutuhan dan permintaan akan tempat tinggal meningkat.

DKI Jakarta merupakan kota besar dengan magnet penyerapan penduduk tertinggi di Indonesia. Dengan jumlah penduduk yang pada tahun 1969 berjumlah 4.273.863 jiwa menjadi 6.239.293 jiwa pada tahun 1979 atau 4,1 persen setahun, maka jumlah areal tanah yang diperlukan tentunya juga semakin meningkat. Luas areal tanah yang pada tahun 1965 adalah 18.000 Ha akibat dari pertambahan penduduk Jakarta terhadap 635 km2 adalah 82 orang/Ha (Bianpoen 1977:12-13)

Jakarta dengan kepadatan penduduknya menyebabkan banyak berbagai macam peristiwa dan kejadian. Surat Kabar sebagai salah satu media yang merekam setiap kejadian dan peristiwa di Kota Jakarta dari masa ke masa mulai dari isu politik, sosial, ekonomi, kebudayaan, ketertiban umum. Serta mengaspirasi keluhan yang ada di masyarakat sebagai corong suara rakyat.

Pada masa peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru dunia pers menjadi sorotan, sempat terjadi pengekangan dan diwarnai dengan aksi pembredelan di beberapa surat kabar yang notabene kritis pada setiap pemberitaan. Pemberitaan yang dianggap merugikan pemerintah harus dibredel dan dihukum dengan dilakukan pencabutan Surat Izin Usaha Penerbitan (SIUP). Misalnya terjadi pada Sinar Harapan, Tabloid Monitor, Detik, Majalah Tempo dan Editor. Pers lagi lagi dibayangi dalam kekuasaan

pemerintah ang cenderung memborgol kebebasan dalam membuat berita, serta menghiangkan fungsi pers sebagai kontrol sosial terhadap kinerja pemerintah

Menurut peneliti pers Indonesia asal Australia David T. Hill, terkait pers yang berkaitan dengan Orba memiliki dua karakteristik. Sebelum Orba runtuh, identik dengan sejarah tentang organisasi pers dan jurnalis atau aktivis pers sebagai pejuang kemerdekaan, dan sejarah tentang intitusi pers ketika menghadapi kebijakan politik rezim yang berkuasa. Setelah Orba runtuh identik dengan sejarah pers sebagai institusi ekonomi dan sosial (Masduki, 2004:1).

Setelah kekuasaan Soeharto selama 32 tahun runtuh, dan digantikan B.J. Habibie, pada 21 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999, media seakan terbebas dari belenggu. Di era inilah kebebasan pers dimulai hingga tahun sekarang ini. Tidak ada lagi ancaman pemberedelan. Setiap orang atau perusahaan bebas membuat perusahaan penerbitan. Maka, di tengah euforia reformasi yang meledak-ledak, tabloid, koran, dan majalah pun bermunculan dengan berita-berita politik begitu dominan. Pers Indonesia semakin semarak mulai tahun 2000 karena bermunculan media-media internet atau online. Situasi semakin meriah karena hadir pula stasiun televisi yang fokus pada siaran berita. Kontras dengan era Orba.
(http://nasional.kompas.com/read/2012/02/11/04210738/Kebebasan.Pers.yang.Bereksses).

Puncaknya di tangan kekuasaan Habibie. Perundang-undangan yang membatasi pers pun dicabut. Habibie membuka kran kebebasan pers dengan acuan undang-undangn (UU) UU Pers Nomor 40 tahun 1999. Dengan UU itu, maka kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara demokratis. Apalagi dalam UUD 1945, secara jelas dijamin tentang hak mengeluarkan pendapat dan pikiran. (Sirikit, 2011 : 181).

Kebebasan politik, agama dan ekonomi semakin tumbuh bersamaan, dengan tumbuhnya pencerahan, maka tumbuh pula tuntutan akan perlunya kebebasan pers. Lahir teori baru yaitu Libertarian Theory atau Teori Pers Bebas yang mencapai

puncaknya pada abad ke-19. Teori itu, manusia dipandang sebagai, makhluk rasional yang dapat membedakan antara yang benar dan tidak benar. Pers harus menjadi mitra dalam upaya pencarian kebenaran dan bukan sebagai alat pemerintah. Jadi tuntutan bahwa pers mengawasi pemerintah, berkembang berdasarkan teori ini. Maka sebutan terhadap pers *The Fourth Estate* atau Pilar kekuasaan keempat, setelah kekuasaan eksekutif, legeslatif dan yudikatif pun menjadi umum diterima dalam terori pers libertarian. Oleh karenanya pers harus bebas dari pengaruh dan kendali pemerintah. Dalam upaya mencari kebenaran, semua gagasan harus memiliki kesempatan yang sama untuk dikembangkan, sehingga yang benar dan dapat dipercaya akan bertahan, sedangkan yang yang sebalinya akan lenyap. (Kusumanigrat, 2006 : 19)

Dampak kebebasan pers pun terlihat, secara kuantitatif dalam lima tahun pertama era reformasi 1998-2003, jumlah perusahaan penerbitan pers di Indonesia mengalami pertumbuhan sangat pesat. Dalam kurun waktu ini setidaknya tercatat 600 perusahaan penerbitan pers baru, 50 diantaranya berada di Jawa Barat. Bahkan pada tahun pertama hingga kedua masa reformasi, bisa disebut disetiap kota di Palau Jawa, setidaknya terdapat 10 perusahaan penerbitan pers baru yang komposisinya 70 persen terbit mingguan dan 30 persen terbit harian. Kenyataan itu, membuat istilah "Pers Indonesia Menggenggam Bara". Jika jejak pendapat yang diselenggarakan Litbang Kompas, 2-3 Februari 2005 dengan responden 872 orang berusia 17 tahun itu, dilakukan dengan metode pencuplikan sistematis dari buku telepon terbaru. Responden berdomisili di Jakarta. Hasil jejak pendapat antara lain menuimpulkan, setelah tujuh tahun kebebasan dinikmati, dunia pers dihadapkan pada posisi yang dilematis. Antara mempertahankan atau menggenggam kebebasan pers. (Haris, 2005 : 26).

Itu artinya, antara pers dengan pemerintahan atau dalam mengawal proses demokrasi, tidak bisa dipisahkan. Bahwasannya demokrasi perwakilan yang konstitusional merupakan cara untuk melaksanakan demokrasi. Robert A. Dahl berpendapat bahwa demokrasi perwakilan merupakan bentuk demokrasi dalam
Skala besar yang membutuhkan lembaga-lembaga politik tertentu sebagai jaminan pelaksanaan demokrasi. Para pejabat yang dipilih, pemilihan umum yang bebas adil

dan berkala, kebebasan berpendapat, sumber informasi alternatif, otonomi asosiasional dan hak kewarganegaraan yang inklusif. (Jenedjri, 2013 :2)

2.3.2 Gambaran Umum Surat Kabar Harian Pos Kota

Pada tahun 1968 Harmoko dan rekan-rekannya memiliki ide untuk membuat surat kabar harian yang berbeda dari media cetak lainnya. Pada umumnya media cetak pada saat itu lebih berorientasi pada politik. Akan tetapi Harmoko dan rekan – rekan seperti Abijasa, Harsono yang saat itu tergabung di PWI Jakarta berpendapat bahwa dalam pembentukan sebuah media harus memiliki modal dan landasan yang kuat agar tidak berhenti dijalan sehingga bisa hidup berkesinambungan. Akhirnya Harmoko menerbitkan surat kabar komunitas yang bersegmentasi masyarakat menengah ke bawah.

Harmoko dan rekan-rekan ingin berita yang disajikan menggunakan bahasa yang sederhana, akan tetapi mempunyai bahasa yang dapat diterima oleh lapisan menengah kebawah. Surat kabar ini juga menampilkan gambar atau foto-foto dalam masyarakat sekitar.Selain mendirikan surat kabar, Harmoko dan rekan-rekan juga mendirikan suatu yayasan yang bernama Antara Kota yang berdiri pada tanggal 5 febuari 1970 (Ghazali & Nasution,2000:1).

Setelah mendirikan yayasan Pos Kota mengurus perizinan kepada Departemen Penerangan surat izin terbit dengan nomor 395/SK/DIR PK/SIT/1970 pada tanggal 10 April 1970 Yahya menyuruh Sahroni membuat prees lease tetapi masih ada hal yang perlu deselesaikan pertama, mengurus surat tanda cetak (STT) yang dikeluarkan oleh, Pelaksanaan Khusus Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Daerah (Laksus Kopkamtibda). Yang kedua, pengadaan sarana cetak yaitu kertas dan tinta cetak, kertas koran pada masa itu merupakan barang langka dan menjadi monopoli pihak tertentu.

Struktural Pos Kota pada masas awal berdiri yakni Yachya Suryawinata sebagai pemimpin umum dan S.Harsono sebagai Wakil sedangkan Dewan Redaksi yakni S.Harsono, Yachya Suryawinata, Harmoko, Pansa Tampubolon, Tahar, S. Abijasa, A Husin.

BAB III
METODOLOGI DAN PENDEKATAN

3.1. Metode Penelitian

Setiap penulisan karya ilmiah, sangatlah diperlukan metode guna untuk membantu penulisan karya ilmiah tersebut, sehingga menjadi lebih mudah da lam proses penulisannya dan hasil penelitian yang dilakukan mengarah pada hasil yang mendekati suatu kebenaran. Dalam Daliman (2012:12) menyebutkan bahwa metode merupakan suatu cara, prosedur atau teknik untuk mencapai sesuatu tujuan secara efektif dan efisien. Jadi, metode selalu erat hubungannya dengan prosedur, proses, atau teknik yang sistematis untuk melakukan penelitian dalam suatu disiplin ilmu tertentu. Seda ngkan metodologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *metodos* yang berarti car a atau jalan yang berhubungan dengan upaya ilmiah dan *logos* yang berarti ilmu.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa metode adalah teknik atau cara penulisan untuk mengkaji dan mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian yang digunakan sebagai asas untuk menem ukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.

Penulisan karya ilimiah dengan menggunakan metode dapat lebih tersusun dan hasil yang diperoleh dapat mendekati kebenaran, termasuk dalam penulisan karya ilmiah berupa sejarah. Dalam Irwanto dan Sair (2014:10) dalam penulisan sejarah tentu berbeda dengan penulisan dalam ilmu sosial lainnya, dimana dalam menulis sejarah diperlukan adanya kajian dimensi masa lampau, pelaku sejarah dan dimana tempat terjadinya suatu peristiwa, sehingga penulisan sejarah ini dapat dikatakan bersifat diakronik dan berfokus pada proses

Menurut Garaghan dalam Irwanto dan Sair (2014:10) mendefiniskan m etode sejarah merupakan kerangka sistematis yang prinsip dan desain hukum

untuk Mengefektifkan pencarian sumber, yang merupakan materi sejarah, m emberi kritik dan menilai sintesis, yang merupakan generalisasi dalam for mat tulisan, untuk mencapai hasil baik.

Dalam sebuah penelitian diperlukan sebuah metodologi dalam memenuhi prosedur tulisan agar lebih sistematis dan tergolong standar ilmiah.metodolog i berasal dari kata metodos,terdiri dari dua suku kata,yaitu metha berarti melewati dan hodos yang berarti cara.jadi dapat dipahami bahwa metodologi adalah ilmu yang membahas kerangka pemikiran tentang menganalisis suatu prinsip yang akan memantik menuju ruang penyelidikan serta penyusunan bidang disiplin ilmu yang terkait.dalam hal ini mengkaji kerangka penelitian sejarah untuk menuju struktur penulisan yang ilmiah.

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode Historis, metode Historis merupakan suatu teknik observasi dalam memfilter fakta dan menyantumkan dengan jelas serta menkorelasikan data data tersebut pada proposisi yang bersifat teoritis. melalui tulisan ini,penulis berusaha mendeskripsikan dan menganalisis pembahasan mengenai Perkembangan Surat Kabar Harian Pos Kota di Kota Jakarta tahun 1970-2000.

3.2. Langkah-langkah Penulisan

Adapun langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam penulisan Skripsi ini meliputi: heuristik, kitik sumber, interpretasi, pendekatan, dan historiografi.

3.2.1. Heuristik

Heuristik berasal dari bahasa Yunani yaitu *heuristikan* yang artinya mene ntukan, mengumpulkan atau menemukan sumber. Heuristik merupakan tahap awal dalam metode sejarah berkaitan dengan mencari sumber-sumber sejarah yang akan kita tulis. Secara umum heuristik yaitu mengumpulkan data atau mencari sumber berdasarkan tujuan penelitian seperti sumber tertulis baik berupa buku, majalah, surat kabar, jurnal, skripsi, dan lain-lain yang berkaitan dengan judul penelitian.

Sumber yang bersifat heuristik diperoleh dari studi kepustakaan yang diperoleh dari berbagai perpustakaan dan dari jurnal atau internet yang terpercaya.

Menurut Barzun & Graff (1970: 63-94 dalam Helius Syamsudin, 2007: 61) sebuah sumber sejarah dapat berupa produk dari berbagai aktivitas manusia yang memiliki poin informasi tentang kondisi kehidupan pada suatu masa.dalam kategori nya, sumber sejarah terdapat suatu peninggalan yang tidak disengaja untuk memberikan informasi pada generasi atau keterangan pada zaman selanjutnya, sumber sejarah yang kedua, memuat informasi yang memeng diperuntukan bagi pewaris generasi selanjutnya, setidaknya pada redaksi tersebut mengandung unsur berita mengenai interaksi kehidupan masyarakat atau tentang tradisi kebudayaan.

Dalam pengumpulan sumber sejarah,terdapat tiga klasifikasi sumber untuk melengkapi penyusunan tulisan atau laporan dalam rangka merekonstruksi keja dian masa lampau dengan dilandasi sumber terkait, kategorinya dibagi menjadi sumber Primer, sekunder dan tersier.sumber primer adalah bukti bukti faktual dari rekaman peristiwa baik berupa catatan harian, surat kabar, keterangan saksi atau keterangan yang diperoleh dari lingkungan keluarga terdekat, jika objek penelitian yang hendak digarap merujuk pada seorang tokoh.sumber sekunder adalah ulisan mengenai sejarah yang telah melalui tahapan interpretasi dari gagasan gagasan tokoh yang mengangkat suatu peristiwa lewat rujukan data sumber primer.sumber tersier adalah suatu kompilasi dari suatu dokumen peristiwa yang telah melewati fase reinterpretasi dari berbgai tulisan tokoh maupun rujukan rujukan data dari lintas sumber (Alian sair dkk,2014:57).

Pada tahap penulisan skripsi ini, penulis menggunakan sumber Primer, sekunder serta tersier, adapun contohnya pada sumber primer, penulis mengutip sumber dokumen atau arsip dari instansi terkait, yaitu ke kantor Pos Kota di Jl. Gajah Mada Jakarta Barat mengenai perkembangan dan tajuk wacana berita yang sudah di terbitkan, yaknibuku 30 tahun melayani pembaca yang di terbitkan oleh Litbang Grup Pos Kota pada tahun 2000 silam sebagai sumber primer. Untuk sumber sekunder , penulis menjadikan rujukan buku buku mengenai pers di Indonesia itu sendiri.

3.2.2. Kritik Sumber

Langkah selanjutnya setelah mengumpulkan sumber data adalah melakukan kritik sumber data yang telah diperoleh. Sumber sejarah hendaknya diteliti tentang keotentikan data.Kritik sumber merupakan tahap untuk menguji jejak-jejak peristiwa masa lampau, kemudian mengkritiknya untuk menilai jejak-jejak itu dari berbagai sudut pandang secara komprehensif. Kritik sumber merupakan usaha mendapatkan kredibilitas sumber.

Jadi, kritik sumber merupakan merupakan tahap untuk menguji keaslian dan relevansi sumber terhadap pembahasan sejarah yang akan ditulis. Fungsi kritik ini adalah untuk meneliti sumber tentang validitas dan kredibilitasnya serta dapat melihat relevansi sumber dengan pembahasan.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis pribadi menggunakan buku buku mengenai Sejarah Pers di Indonesia Jakarta khususnya lewat buku-buku dan melakukan wawancara langsung pimpinan redaksi dan sekretasis harian Pos Kota. Penulis juga mencantumkan sumber primer mengenai perkembangan Pos Kota serta wawancara dengan para pimpinan redaksi maupun yang pernah menjabat.

Kegiatan ini dilakukan untuk menentukan apakah sumber sejarah yang ada itu dapat atau tidak dapat digunakan dan juga untuk melihat kebenaran dari sumber itu. lalu tergerak atas kesadaran akan penting nya menyumbangkan karya intelektual yang kaya akan gagasan serta usaha dalam mengabadikan rekam jejak perjalanan Pos Kota yang tertuang dalam buku.

Kritik sumber ini dibagi menjadi dua yaitu:

3.2.2.1. Kritik Intern

Kritik inter merupakan usaha untuk memahami secara benar tentang data guna memperoleh suatu kebenaran dengan memfilter informasi yang ditelusuri agar dapat merekonstruksi kejadian seobjektif mungkin dari berbagai perspektif hingga menghindari kesan figursentris (Sudarto, 1997: 45). Proses kritik interen merupakan tahap mengidentifikasi informasi terkait untuk menyusun suatu redaksi yang lebih kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan sal

usul data nya, kritik interen bisa diterapkan lewat metode wawancara dengan memperbandingkan kesaksian responden atau narasumber dari berbagai tokoh yang dituju,baik sebagai pelaku maupun sebagai saksi, agar mampu mengelaborasi dan mengeksplorasi sumber secara rinci serta komprehensif, opsi kedua dengan melakukan penelusuran lewat sumber tulisan koran atau wawancara pelaku sejarah yang bersinggungan langsung dengan Pos Kota baik dari Wartawan Pos Kota maupun pimpinan redaksi Pos Kota lalu penulis tinggal melakukan penafsiran berdasarkan landasan sumber tersebut.apabila prosedur identifikasi sumber lisan dan sumber fisik telah diterapkan, maka akan mempermudah penulis memahami rangkaian peristiwa yang hendak direkonstruksi (Sugeng Priyadi, 2012 : 68).

3.2.2.2. Kritik Ekstern

Menurut Helius (2007 : 133), kritik ekstern merupakan suatu penelitian atas asal usul dari sumber, suatu pemeriksaan atas catatan tau peninggalan itu sendiri untuk mendapatkan semua informasi yang mungkin, dan untuk mengetahui apakah suatu waktu sejak asal mulanya sumber itu telah diubah orang orang tertentu atau tidak. Kritik ekstern ini merupakan kritik terhadap sumber yang bertujuan untuk menetapkan otentik atau tidak sumber yang dipakai. Caranya dengan kompilasi atau membandingkan antara buku dengan dokumen yang diperoleh, sumber yang dipakai dari buku yang bersangkutan saling diperbandingkan juga.

Kritik eksteren lebih memberi penilaan kepada keotentikan sumber sejarah itu sendiri, jika sumber sejarah dibenturkn dengan bentuk lisan, maka yang harus diverifikasi narasumber yang dituju harus memenuhi kriteria untuk dimintai keterangan berdasakan peristiwa ataupun informasi yang hendak diperoleh, maka harus dipastikan bahwa narasumber harus terlepas dari kepikunan atau gangguan mental, karna menyangkut informasi yang hendak digali dari pengalaman atau kesaksian nya dimasa lampau, jika terdapat kecacatan keterangan maka akan menciptakan kekeliruan menyusun suatu laporan bahkan yang lebih fatal akan menyebabkan penyimpangan makna kan peristiwa tersebut,

mengenai pengidentifikasian lewat sumber fisik atau tertulis prosedur yang harus diperhatikan mengenai relevansi sumber dengan peristiwa yang hendak direkonstruksi, penulis atau peneliti harus benar benar selektif menetapkan standarisasi dengan menyesuaikan konteks peristiwa terhadap sumber terkait, baik dari segi gaya tulisan didalam koran tersebut maupun pengamatan sumber tersebut dapat membantu menyesuaikan kondisi waktu dan batas identitas wilayah dari keotentikan sumber, sekaligus memahami kondisi fisik sumber tersebut jika telah terjadi perubahan perubahan tertentu.jadi titik konsen yang harus diperhatikan dalam melakukan verifikasi pada kritik ekstern adalah memperhatikan keotentikan sumber dan elevansi sumber baik secara temporal maupun spasial, sehingga mampu mentelaah peristiwa serta konteks masalah sesuai dengan skup yang ditentukan (Priyadi, 2012 : 63).

3.2.3. Interpretasi

Interpretasi merupakan penafsiran dari sumber atau data yang dapat,untuk menganalisis data agar bersifat kredibel dan relevan sebagai tulisan yang mengandung informasi ilmiah.dalam prosedur interpretasi diperlukan sudut pandang yang komprehensif agar penulisan bersifat objektif,tanpa merugikan suatu pihak manapun,dan murni sebagai suatu pengkajian topik dalam menguak tabir yang berserakan,sehingga dapat mengolah data yang bertransformasi menjadi fakta.

Tahapan interpretasi merupakan lanjutan dari prosedur kritik sumber, pada fase kritik sumber, peneliti atau penulis berupaya untuk mengidentifikasi dan menseleksi informasi yang diserap agar dapat membangun fondasi data untuk direkonstruksi, pada fase interpretasi pelaku penulisan menindak lanjuti data yang masuk dan telah diverifikasi untuk ditafsirkan sehingga mencetuskan pemahaman akan alur peristiwa beserta masalah yang berhubungan pada konteks pembahasan, untuk menghindari penyelewengan makna maka penulis harus mentaati kaidah penafsiran, yaitu bias personal, dalam kategori ini penulis harus menghindari kesan subjektifitas terhadap objek pembahasan, jangan sampai terbawa arus sentimen yang menjurus pada merugikan pihak manapun dan

mengunggulkan salahsatu pihak, pada ranah tertentu sisi subjektifitas dalam penulisan sejarah sulit dihindarkan karna menyangkut konsepsi pemikiran, primordial serta sifat nepotistik tertentu yang berkaitan dengan objek pembahasan.

Faktor kedua menyangkut penerapan teori sebagai pisau analisis membedah peristiwa yang terjadi, pada tahapan ini penulis ataupun peneliti rawan menyesuaikan teori yang berkaitan dengan konteks peristiwa yang hendak diteliti, terkadang karna tendensius terhadap teori sosial maka penulis memaksakan memahami peristiwa dengan konsepsi teori tersebut, padahal ranah permasalahan nya mengenai kebudayaan, sehingga profesionalitas penulisan dicederai lewat kecenderungan pemahaman dan menyebakan presisi penulisan serta daya analisis tereduksi (Sugeng priyadi, 2012 : 77).

3.2.4. Historiografi

Historiografi merupakan struktur cara atau langkah penafsiran, penjelasan dan penyajian sejarah dengan prosedur rekonstruksi peristiwa masa lampau,mel alui identifikasi data yang diperoleh,sehingga dalam penulisan sejarah dapat diterima keabsahan nya.dalam memenuhi langkah penulisan sejarah,histor iografi merupakan klimaks dari susunan penyajian tulisan karya ilmiah.Menurut Veyne dalam (Alian sair dan dkk, 2014 : 159) parameter keberhasilan sejarawan dalam menyajikan tulisan sejarah nya, tergantung dari kepiawaianya dalam menganalisis dan menghubungkan data, keahlian menerjemahkan sikap pelaku sejarah serta ketajaman intuisi nya dalam menelusuri pemikiran, mental dan karakteristik kelompok yang hendak diteliti, jadi dalam rangka penulisan sejarah, tidak saja dibutuhkan data dan sumber yang valid lagi otentik, tapi diutamakan juga bagaimana penulis memiliki kompetensi yang jelas dalam mennyikapi suatu kasus, bukan sekedar mengedepankan selera pemahaman dan justifikasi menurut subjektifitas konsepsi pemikiran.

Historiografi merupakan tahap akhir dari penelitian, signifikansi semua fakta yang dijaring melalui metode kritik baru dapat dipahami hubungannya satu sama lain setelah semuanya ditulis dalam suatu keutuhan bulat historiografi.pada tahap ini, penyajian tulisan sudah melewati fase

qualifikasi data yang benar valid dan relevan, penafsiran makna yang terkandung didalam sumber, sehingga tidak terkesan dogmatis dan doktriner, jadi memena benar benar mengemukakan pandangan objektif demi merangkai ulang suatu fenomena yang telah usang, untuk diproyeksikan sumbangsih karya ilmiah dan memiliki nilai edukasi bagi ranah akademis maupun suatu kontribusi penting untuk melestarikan nilai historis yang menjadi suatu identitas lokal maupun nasional bagi suatu kelompok (Sjamsuddin, 2007: 99).

Dalam tulisan ini, penulis mengangkat penulisan tentang Perkembangan Surat Kabar Harian Pos Kota di Kota Jakarta tahun 1970-2000.

3.2.5 Pendekatan

Pendekatan merupakan media bantu dalam memperjelas pembahasan dengan menerapkan pengkajian masalah melalui konsep ilmu yang berkaitan,atau konsep interdsipliner.dalam pembahasan materi ini,penulis menggunakan pendekatan ilmu politik dan Sosiologi.

3.2.5.1 Pendekatan Ilmu Komunikasi

Menurut Schudson (1991) ada tiga kategori dari kajian komunikasi perspektif historis, yang dilihat bukan dari sisi metodologinya melainkan pada persoalan cakupan studi. Ketiga kategori itu adalah

3.1 *Macro history of communication,* merupakan bidang cakupan yang paling luas dan menyoal hubungan antara media dan perkembangan manusia

3.2 *The history proper of communication,* memusatkan perhatian pada hubungan antara media dengan kebudayaan, politik, ekonomi dan sejarah sosial

3.3 *Institutional history,* yang fokus pada perkembangan media massa, bahasa, novel sampai dengan sejarah perfilman

Menurut M. Ridwan (1992) Jurnalistik ialah suatu kepandaian praktis mengumpulkan menulis,mengedit berita,untuk pemberitaan dalam surat kabar,majalah atau terbit berkala lainnya.

Dalam hal ini penulis juga menyesuaikan dengan teori – teori penulisan jurnalistik yang ada di Pos Kota karena kaidah- kaidah bahasa yang dipakai surat kabar harian Pos Kota memiliki struktur bahasa dan aturan sendiri berbeda dengan surat kabar

pada umumnya karena surat kabar harian Pos Kota sendiri beritanya seakan serampangan dan sembarangan menulis cenderung bahasa yang tidak baku dan formal tetapi dalam memuat penulisan berita Pos Kota menggunakan aturan bahasa jurnalistik sendiri yang menyesuaikan dengan kode etik Jurnalistik.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Latar Belakang Berdirinya Surat Kabar Harian Pos Kota

Pada masa awal Orde Baru pers yang dulunya dibreidel pada masa Orde Lama banyak yang diberikan kembali izin terbit serta di berikan ruang untuk bebas mengembangkan pers sedimikian rupa sesuai dengan pasar yang dituju oleh pers tersebut tentu dari awal transisi kebebasan pers itulah Pos Kota hadir dengan membawa suatu keunikan dan ciri khas tersendiri yang tidak dimiliki oleh koran lain pada masa itu.

Kelahiran surat kabar harian Pos Kota tidak bisa terlepas dari para pendiri dan juga pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) DKI Jakarta pada masa itu yakni Harmoko, Yachya Suryawinata, S. Abijasa, S. Harsono dan kawan kawan lainnya yang merasa perlu adanya warna dalam dunia pers yang ada di Jakarta dimana tidak hanya diisi koran yang berisi berita politik saja tetapi lebih ke koran popular atau popular newspaper yakni koran yang memberitakan tentang potret ibukota Jakarta dari perspektif masyarakat menengah kebawah dengan bahasa sehari-hari masyarakat ibukota yang mudah dicerna dan Pos Kota sendiri memberitakan berita aktual yang sesuai dengan informasi yang dibutuhkan masyarakat menengah kebawah.

4.1.2 Karakteristik Surat Kabar Harian Pos Kota

Secara fisik kolom berita surat kabar harian Pos Kota memiliki dua garis besar yakni berita Kriminal dan Perkotaan karena dalam setiap penerbitannya suka menonjolkan berita kriminal dengan huruf yang besar serta sensasional. Dalam hal meliput berita kriminal Pos Kota selalu lebih dulu dibanding surat kabar lain. Khusus untuk berita berita krimina sekecil apapun hampir tidak lolo dari pemantauan jaringan wartawan Pos Kota yang tersebar di berbagai sudut Ibu Kota dan sekitarnya apalagi berita kriminal besar selalu menjadi sajian utama bagi Pos Kota. Pos Kota juga sering dijadikan referensi bagi banyak pihak yang ini mengetahui lebih dalam mengenai peristiwa peristiwa kriminal di Jakarta khususnya dan kota-kota besar di Indonesia umunya (wawancara Sutiyono, 27 Juli 2019)

Pos Kota juga kerap membuat judul berita yang sensasional sebagai contoh "Sejak SMA Putri Ari Sigit Kenal Narkoba". Berita sebenarnya sudah sangat sensasional tanpa memakai teknik sensasi karena subyek yang di angkat adalah cicit presiden ke- 2 Indonesia Soeharto. Tema sebenarnya yakni tentang penangkapan pengguna narkoba tetapi karena yang ditangkap adalah cicit presiden jadi fokus berita bukan lagi tentang pemakai narkoba ataupun bagaimana penangkapannya. Dan fokus berita lebih ke latar belakang sebagai cicit presiden Soeharto (Zainal Arifin Emka,2009:12)

Namun walaupun berita yang disajikan bersifat Sensasional dan Bombastis tapi tetap mengikuti kaidah-kaidah kode etik penulisan Jurnalistik tidak serta merta serampangan misalnya untuk korban. Foto korban akan disensor dan batasan asal wilayah korban paling jauh hanya sampai tingkat Kecamatan serta juga tidak menyudutkan korban (Wawancara Sutiyono 27 Juli 2019)

Hal ini disebutkan didalam kode etik Jurnalistik Pasal 5 yang berbunyi "Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan" (Dewan Pers,2016:36)

Pos Kota menurut P.K Ojong adalah koran ajaib. Mirip bayi ajaib yang memang di beritakan gegap gempita secara faktanya. Walaupun kemudian memang terbukti bahwa Cut Zahara Fona melakukan penipuan karena menyimpan tape recorder di balik gaun yang dipakai yang disetel seolah suara bayi mengaji atau mengeluarkan suara tertentu. Bayi ajaib Cut Zahara Fona mendongkrak tiras Pos Kota untuk tahun pertama itu dan jadilah Pos Kota koran ajaib. Karena dengan resep yang barangkali dianggap kurang atau tidak intelektual terlalu sensual,selera rendahan ternyata justru mampu membina dan mengembangkan tiras yang akan menjadi koran terbesar di Indonesia. (Litbang Grup Pos Kota,2000:7)

4.2 Proses Berdiri Surat Kabar Harian Pos Kota

Istilah koran kuning sudah muncuk sejak era Demokrasi Liberal. Namun perwujudan koran kuning di Indonesia baru muncul pada era Orde Baru seiring dengan terbitnya harian Pos Kota dengan trilogi informasi yang disajikan yakni Kriminalitas Kekerasan dan Seksualitas.

Menurut Lukman Solihin dalam artikelnya *Pos Kota Sang Pemula* menyebutkan Harmoko memperoleh ide koran kuning ketika menghadiri sebuah konferensi bertajuk "Asia Assembly" pada april 1970 di Manila,Filipina yang diselenggarakan oleh Press Foundation of Asia (PFA). Di Manila pada saat itu tengah menjamur koran-koran popular yang dijual murah di emperan jalan. Dari situlah kemudian Harmoko tertarik untuk menerbitkan koran sejenis di Indonesia.

Maka pada 15 April 1970 Pos Kota terbit dengan oplah sebanyak 3.500 eksemplar dan dijual dengan harga eceran Rp 10,00 harga yang setara dengan ongkos sekali jalan bus kota di Jakarta kala itu, Meski usianya belum genap setahun keberadaan Pos Kota sebagai koran popular berhasil menarik perhatian khalayak ibu kota. Oplah Pos Kota semakin melejit mencapai angkaa 21.000 eksemplar setelah secara bersambung memuat cerita sensasiona tentang bayi ajaib yang bisa bicara dalam perut ibunya, Cut Zahara Fona. Dan tentang berita kematian presiden Soekarno. Meskipun terbukti bahwa Cut Zahara Fona telah melakukan penipuan

karena menyimpan tape recorder kecil yang disetel untuk mengeluarkan suara tertentu seperti suara bayi mengaji di balik setagen dalam gaun yang dipakainya, namun cerita tentang bayi ajaib telah melambungkan nama dan mendongkrak oplah Pos Kota di tahun pertamanya terbit (Rosihan Anwar,2000:7).

Fenomena Pos Kota dengan berhasil memosisikan diri sebagai koran popular dengan berita berita sensasionalitasnya mirip dengan fenomena koran-koran sejenis di Amerika pada penghujung 1800an yang kemudian melahirkan istilah koran kuning yang para pembacanya adalah masyarakat bawah. Pos Kota juga berhasil menyasar pembaca kelas bawah ibu kota, dengan berita-berita seputar kriminalitas, kekerasan dan seksualitas. Pos Kota juga tampil dengan cerita-cerita bergambar seperti Doyok, Dul Kemplo, Ucha dsb. Ciri khas lain adalah pada segi tampilan Pos Kota dicirikan dengan tata letak dengan menonjolkan judul berita yang ditulis besar dengan kalimat bombastis. Bahkan sebagai penonjolan,judul dan tubuh berita diberikan warna tertentu. Menurut Rosihan Anwar menyebutkan tata letak yang amburadul. Selain judul dan berita sensasionalitas. Pos Kota juga menampilkan rubrik khusus seperti Nah Ini Dia… yang isinya tak kalah sensasional dengan berita berita yang ditampilkan. (Ashadi Siregar,1998:27)

Kelahiran Pos Kota sebagai koran populer di era Orde Baru dinyatakan seperti sebuah anomaly dan seolah melawan arus. Selain dikenal dengan kekangan atas kebebasan persnya. Surat kabar- surat kabar yang ada kala itu cenderung dengan pemberitaan –pemberitaan dengan gaya bahasa formal sesuai dengan semangat rezim orde baru yang sangat formalistik sehingga banyak pihak memandang koran seperti itu hampir mustahil bisa terbit di Indonesia. Alasan kemustahilan pertama terbitnya koran populer kala itu. Pertama sejak awal para wartawan yang terlibat aktif dalam pergerakan nasional adalah orang-orang yang serius mengemban misi perjuangan. Demi gengsi mereka enggan menerbitkan koran populer. Kedua jika berani menerbitkan koran populer mereka akan berhadapan dengan kenyataan bahwa masyarakat kelas bawah

belum memiliki daya beli yang cukup untuk berlangganan koran. (Jurnal Ajudikasi Abdul Malik 2005)

Faktanya, kehadiran *Pos Kota* sebagai koran populer justru sangat diminati dan memperoleh tempat khusus di masyarakat akar rumput. Mengomentari fenomena ini, Jakob Oetama menyatakan sebagai cerminan keinginan pembacanya. Dalam hal ini ia mengatakan bahwa media populer ini menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan informasi mengenai hal-hal yang sifatnya tetek bengek tetapi dengan aroma sensasional, sama halnya dengan perasaan ingin tahu tentang gosip tetangga maupun rekan kerja. Sedangkan Ashadi Siregar yang melihat dari sisi dunia sosial pembacanya yang notabene kaum urban mengatakan bahwa *Pos Kota* telah menggantikan media sosial lama yang hilang selama berada di Jakarta. Kaum urban kelas bawah yang merupakan pendatang telah kehilangan ruang-ruang komunikasi sehari-hari untuk membicarakan persoalan mereka. Kaum pendatang ini memerlukan media untuk saling bertukar informasi layaknya ebiasaan mereka dalam bergosip. Ketika di kampung, mereka dapat berkumpul dengan tetangga, mengobrol di pos ronda, atau di warung kopi. Topik obrolannya adalah masalah seputar mereka, tentang kejadian sehari-hari seperti si Polan yang kemalingan, anak Pak Soma yang hilang, mbakyu Anu ketangkap basah, Si Sono bunuh diri, atau harga kebutuhan pokok yang melambung tinggi. Media sosial inilah yang hilang dan lalu diisi oleh *Pos Kota* (Jurnal Ajudikasi Abdul Malik 2005)

Cerita tentang keberhasilan *Pos Kota* menciptakan ceruk pasar tersendiri di tengah-tengah keberadaan koran-koran *mainstream* tidak berhenti seiring bergantinya rezim pemerintahan, dari orde baru ke reformasi. Sebaliknya, era reformasi dengan kebebasan persnya semakin menancapkan taji *Pos Kota* sebagai koran populer dengan jumlah pembaca terbanyak sekaligus mengalahkan jumlah pembaca koran serius semacam *Kompas*. Hal ini setidaknya dapat dibuktikan dari hasil survey yang dilakukan oleh sejumlah lembaga. Survey Media SPS pada tahun 2000, misalnya, menyatakan bahwa jumlah pembaca *Pos Kota* di wilayah Jabotabek

mencapai 2.304.000 orang, mengungguli *Kompa*s yang hanya memiliki jumlah pembaca sebanyak 1.521.000 orang. Lalu, pada tahun 2007, berdasarkan data Nielsen Media Research, jumlah pembaca *Pos Kota* di Jabotabek hingga bulan November 2007 mencapai 1.199.000 orang dan berada di urutan kedua setelah Kompasdengan jumlah pembaca 1.337.000 orang(https://bincangmedia.wordpress.com/tag/sejarah-jurnalisme-kuning-di-indonesia/ Diakses pada Selasa 3 Oktober 2019 pukul 02.01).

Sedangkan secara nasional *Pos Kota* juga pernah mengungguli *Kompas* baik dari sisi oplah maupun dari jumlah pembaca. *Majalah Cakram Fokus* edisi Mei-Juni 2005 merilis hasil survey yang dilakukan oleh Nielsen Media Research yang menempatkan *Pos Kota* sebagai terbitan paling laris di Indonesia dengan tiras mencapai 600.000 eksemplar dengan pembaca mencapai 2.551.000 orang, mengungguli oplah dan pembaca *Kompas* yang berada di urutan kedua.

Pos Kota semakin berani menampilkan berita-berita sensasional dan bombastis, baik isi maupun judul, seperti berikut ini: *Suami dibakar Cemburu Bunuh Istri Pakai Racun* (Edisi Sabtu 2 Mei 1998), *Diuber – uber Arwah Isteri Sendiri Sejak Kawin Lagi* dengan sub judul *Laki2 Kalap Potong Alat Vital Sendiri* (Edisi Senin 1 April 1974), *Penjakit Kelamin Melanda Peladjar dan Mahasiswa* dengan sub judul *Sipilis Hippies Kebal Dari Segala Matjam Obat* (Edisi Rabu 6 Januari 1971), dan *Terpojok Karena Sering Disakiti dan Dihina* dengan dua sub judul *Banyak Lelaki Jadi Impoten Karena Istri Wanita Karier* (Edisi Kamis 2 Januari 1986). Tidak hanya berita seputar kriminalitas, kekerasan dan seksualitas, dunia politik pun tidak lepas dari komoditas pemberitaannya, ranah yang pada zaman Orde Baru cenderung dihindari. Foto-foto yang ditampilkan tak kalah berani dan vulgar. Foto pelaku kejahatan yang babak belur dihakimi massa atau korban kecelakaan lalu lintas ditampilkan apa adanya. Begitu pun dengan foto artis dan selebritis, ditampilkan dengan gaya dan dandanan yang dikenal sebagai foto "sekwilda" alias sekitar wilayah dada dan "bupati" atau buka paha tinggi-tinggi.

Kesuksesan *Pos Kota* dengan jurnalisme kuningnya rupanya menginspirasi penerbitan lain untuk membuat koran sejenis. Kesuksesan Pos Kota dengan

jurnalisme kuningnya rupanya menginspirasi penerbitan lain untuk membuat koran sejenis. Di sejumlah daerah bermunculan koran yang ber *genre* sama dengan Pos Kota. Antara lain *Lampu Merah* dan Non Stop yang terbit di Jakarta, Meteor yang terbit di Semarang, *Posko* yang terbit di Manado, *Pos Metro* yang terbit di tiga kota sekaligus (Bogor, Medan, Batam), dan Merapi yang terbit di Yogyakarta. Khusus untuk *Lampu Merah*, sejak Minggu, 20 Oktober 2008 berubah nama menjadi *Lampu Hijau*. Pada pengantar edisi perdana *Lampu Hijau* ditulis dengan berganti nama baru, *Lampu Merah* ingin mengubah citranya menjadi koran yang lebih "teduh" sebagaimana filosofi warna hijau. Akan tetapi dalam praktiknya perubahan tersebut hanya terlihat dari pengurangan materi seksualitas. Sebagai gantinya *Lampu Hijau* menambah materi berita-berita politik dan kriminalitas dengan teknik pengemasan dan penyajian yang sama dengan Lampu Merah (https://bincangmedia.wordpress.com/2010/04/30/menelisik-sejarah-koran-kuning-di-indonesia/).

Sebagaimana juga *Pos Kota*, koran-koran yang terbit di masa reformasi ini juga menjual sensasionalitas dengan judul yang bombastis disertai foto-foto yang vulgar

4.3 Perkembangan Surat Kabar Harian Pos Kota 1970-2000

Setiap surat kabar manapun pasti memiliki corak kekhasan tersendiri didalam perkembangan dinamika yang dibentuk oleh keunikan surat kabar tersebut dan memiliki sejarahnya masing masing dalam menyajikan berita begitupun surat kabar harian Pos Kota akan selalu berbeda sentuhanya di setiap ke pemimpinan pada tahun 70an misalnya tentu akan berbeda layout Pos Kota pada era 80an tetapi keunikan yang dimiliki oleh Pos Kota akan selalu sama sebagai pelopor koran kuning atau lebih dikenal dibarat sebagai *yellow newspaper*.

4.3.1 Perkembangan Surat Kabar Harian Pos Kota Pada Tahun 1970-1984

Susunan Pengurus Pos Kota Pada Awal Terbentuk 1970

Pemimpin Umum	Jachja Surjawinata
Wakil	S. Harsono
Pemimpin Redaksi	Harmoko
Dewan Redaksi	S. Harsono (Ketua), Jachja Surjawinata, Harmoko, Pansa Tampubolon, Tahar, S. Abijasa, A. Husin
Pemimpin Perusahaan	S. Harsono
Wakil	Pansa Tampubolon

(Dikutip dari koran Pos Kota edisi Kamis, 4 Juni 1970)

Pada era ini lebih dikenal sebagai masa rintisan dan berdirinya koran Pos Kota. Pada masa ini Pos Kota di pimpin oleh Harmoko. Baru seminggu setelah terbit, banyak tanggapan yang masuk dari kalangan pers mempertanyakan "ini jurnalisme apa?". Harmoko menjawab "Pokoknya kalau bukan golongan menengah-bawah, lebih baik jangan baca". Bulan bulan pertama mencatat betapa prihatinya usaha penerbitan ini. Masyarakat umumnya bersikap sinis. Ada kecenderungan kuat yang memasukan harian ini sebagai surat kabar porno,koran tukang becak,koran cabul dan dikalangan pers sendiri harian ini dianggap kurang intelektual.

Pos Kota sebuah surat kabar kota metropolitan Jakarta. Di antara sekian banyak media pers yang terbit di Ibu Kota. Bisa disebut surat kabar inilah yang sepenuhnya mencerminkan denyut masyarakatnya. Selintas kita membacanya sudah memamami orientasi lokalitas jurnalismenya. Di metropolitan Jakarta terdapat segala puncak dari aktivitas kenegaraan dan kemasyarakatan. Tidak terhindarkan bahwa elit sosial, ekonomi dan politik berada disini. Jakarta diharapkan menjadi etalase yang memberi gambaran wajah Indonesia. Sebagai etalase seharusnya yang terlihat adalah pilihan yang terbaik. Sebuah kota yang dapat dijadikan contoh bagi ketertiban dan keteraturan sosial, untuk melihat wujud nyata masyarakat Indonesia. Orde Baru ditandai dengan upaya pembangunan ekonomi besar – besaran, dengan meningkatkan kapasistas infrastruktur dan menumbuhkan industri manufaktur dan jasa melalu modal dalam

negeri maupun modal asing. Pembangunan infrastruktur yang dikerjakan dengan teknologi pada awal 70an dengan sendirinya memerlukan pekerja kasar dalam jumlah besar. Begitu pula industri yang mendapat prioritas adalah menyerap dan memberi tempat kepada pekerja kerlas bawah (Litbang Pos Kota)

Tetapi membangun sebuah kota tidaklah sederhana membuat taman bunga. Di dalam ruang hidup ini terdapat pula aktivitas sebaliknya, suatu interaksi dalam lapisan bawah. Karenanya perlu dipahami bahwa kota metropolitan adalah suatu lingkungan sosial dengan aneka wajah, multi dimensi. Setiap dimensi memiliki karakter yang khas, sehingga kecenderungan sosiologis dan psikografisnya akan menampilkan pola yang beragam. Populasi Metro Jakarta bukan lagi sekedar kumpulan etnis yang mudah diidentifikasikan melalui latar budayanya, tetapi adalah sebagai beragam kelompok sosial dengan stratifikasi yang sangat heterogen. Secara berangsur terbentuk suatu budaya kota metropolitan bukan atas dasar etnis lagi melainkan bertolak dari kekhasan dari berabagai stratifikasi itu (Encub Soebekti,2000:26)

Hanya saja ada kalangan pimpinan pemerintahan yang mendukung usaha dan cita cita harian ini. Salah satunya Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin yang mempunyai keinginan adanya suatu harian yang dapat memberitakan masalah masalah ibukota menjadi tanggung jawabnya.

Pendiri Pos Kota lah yang membaca munculnya kaum urbanis baru dengan ciri sosiografis dan psikografis yang khas di Jakarta. Sementara para wartawan yang ikut membangun bersamaan dengan tumbuhnya Orde baru pada tahun 70an terpesona dengan gagasan-gagasan modernism, ingin berperan sebagai agen pengubah sosial dalam proses modernisasi. Wacana diskusi publik yang berbau intelektual dan akademis dikalangan wartawan Orde Baru selalu bersimpati kepada massa, tetapi sebenarnya kecenderunganya bersifat elitis. Simpati kepada massa itu hanya diwujudkan dalam gagasan-gagasan dan nilai modern, dengan tujuan untuk mengubah masyarakat ke dalam tataran yang ideal untuk kehidupan sosial dan kenegaraan. Cara pandang bahwa media massa sebagai agen perubahan dan pembaruan sosial ini pada dasarnya bersifat top down. Dengan asumsi akan kebenaran gagasan dan nilai yang

berasal dari kaum elit, massa dibayangkan sebagai sasaran yang perlu di ubah pengetahuan, sikap dan perilakunya. Kepercayaan yang kelewat besar akan peran media sebagai agen perubah ini menyebabkan terlupakannya dinamika yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat.(Litbang Pos Kota,2000:72)

Diskusi publik tahun 70an mengasumsikan bahwa pembangunan ekonomi dan pembaruan sosial sebagai dua sisi dari satu koin. Pembangunan ekonomi bertujuan akhir kepada pembaruan sosial. Atau sebaliknya, pembaruan sosial sebagai prasyarat bagi perjalanan pembangunan ekonomi. Dengan tujuan semacam ini maka indikator pembangunan dilihat dari keadaan sosial, dalam hal ini dengan istilah yang sangat populer pada awal Orde Baru yakni keadilan dan demokrasi. Tetapi wacana diskusi publik ini hanyalah keasyikan sendiri bagi kaum intelektual, akademis dan jurnalis. Dengan kata lain para agen pembaruan ini mengabaikan proses besar yang berlangsung.

Pos Kota sendiri bukanlah koran politik ini dituturkan oleh pemimpin redaksi Pos Kota Sutiyono pada saat wawancara beliau mengatakan Pos Kota itu koran perkotaan yang membicarakan kriminalitas yang dibumbui oleh berita berita yang bombastis agar menarik perhatian pembaca, berbeda dengan surat kabar lain yang bersifat politik dan nasional, Pos Kota adalah koran lokal Jakarta yang membicarakan masyarakat bawah di ibukota dan menyuarakan suara masyarakat kecil (Wawancara Sutiyono 27 Juli 2019)

Bahwa pembaruan sosial tidak seiring dengan pembangunan ekonomi. Bahkan dapat dikatakan pembangunan ekonomi tidak bertujuan kepada pembaruan sosial tetapi kepada pertumbuhan yang sepenuhnya menggunakan ukuran-ukuran ekonomi. Menempatkan media massa sebagai agen perubahan sosial dengan gagasan dan nilai yang diasumsikan ideal bagi masa depan masyarakat tak lebih dari ilusi. Gagasan dan nilai yang diyakini kebenarannya ini hanya menjadi kesombongan intelektual sebab ingin menempel kepada kekuasaan negara untuk melakukan rekayasa terhadap masyarakat. Ironisnya birokrasi negara pelaksana pembangunan memiliki orientasi sendiri yang makin bersimpang jalan dengan kaum intelektual dari awal Orde Baru.

Pembangunan ekonomi menuntut prasyarat stabilitas sosial dan politik bukan pembaruan sosial. Dengan bahasa Bung Karno kaum intelektual awal Orde Baru ini sudah keblinger menggunakan gagasan dan nilainya sendiri dalam paradigm pembangunan yang dianut oleh birokrasi pembangunan. Sementara gagasan dan nilai yang akan diwujudkan dalam paradigm pembangunan adalah stabilitas dan pertumbuhan. Dua sisi dari pembangunan yang dijalankan pada awal Orde Baru ini pada akhirnya mengambil korban sejumlah media pers dari kaum intelektual pada tahun 1974. (Litbang Pos Kota,2000:83)

Sejumlah surat kabar yang menganut paradigma pembangunan untuk perubahan sosial terimbas dalam tindakan keras kekuasaan negara terhadap kaum intelektual yang menginginkan proses modernisasi untuk keadilan dan demokrasi. Pembredelan baik sementara maupun selamanya dilakukan pemerintah terhadap sejumlah media pers pionir Orde Baru yaitu Nusantara, Suluh Berita, Mingguan Mahasiswa Indonesia, Harian Kami, Indonesia Raya, Abadi, The Jakarta Times, Wenang, Pemuda Indonesia, Pedoman, Majalah Ekspres, dan Indonesia Pos. Tidak ada yang salah dalam gagasan dan nilai modernisasi kecuali salah tempat dalam proses pembangunan yang sedang berlangsung. Mungkin juga pretensi untuk menjadikan media pers sebagai agen perubahan dan pembaruan sosial sebagai pilihan yang terlalu idealistis sekaligus sama sekali tidak realistis. Ini soal pilihan paradigma dalam penyelenggaraan media pers. Paradigma keberadaan media pers memang dapat berfungsi misionaris mengemban misi untuk menyebarkan gagasan nilai dan doktrrin dan bertujuan membentuk masyarakat. Tetapi di lain pihak paradigm media pers dapat berfungsi untuk memenuhi motivasi khalayaknya karenanya hanya akan merefleksikan hal yang ingin diketahui khalayak tersebut. Dengan demikian informasi pers bertolak dari kecenderungan sosiografis dan psikografis khalayak bukan dari gagasan gagasan ideal para pengelola media. Kedua ragam media pers ini sebagai pilihan yang sama sahnya bagi para jurnalis. Kalaupun harus dibedakan tipe pertama lahir dari kaum jurnalis yang terpesona kepada gagasan dan nilai idealistis sementara kedua lebih bersifat pragmatis. Nampaknya kejujuran dan kerendah hatian dari jurnalis tipe kedua

ini menjadi dasar dalam mengabdi kepada khalayak yang menjadi sumber dan orientasi jurnalismenya.(Litbang Pos Kota,2000:84)

Pos Kota mengisi kehampaan yang dialami para urbanis yang terpisah dari desa dan harus menjalani pola kehidupan yang tidak pernah dikenali sebelumnya. Biasanya media sosial sekaligus menjadi media belajar dan mengenali lingkungan komunitas. Untuk menjadi operator ditempat kerja mungkin dapat belajar. Tetapi sebagai bagian dari populasi Jakarta. Tidak ada tempat belajarnya. Media sosial disini sangat terbatas. Karenanya kehadiran Pos Kota sangat signifikan pada tahun 1970 dia menjadi media satu satunya yang menggantikan fungsi media sosial kaum urbanis lapisan di bawah garis.(Sardjono Jatiman,1993:17)

Belakangan bermunculan koran yang mengikuti Pos Kota. Tetapi sebagai pionir Pos Kota telah berakar dalam khalayak Jakarta. Keberadaanya telah menjadikan kehidupan di bawah garis tetap teraktualisasi bagi lapisan ini. Dengan demikian khalayak ini tetap mendapatkan dan mengetahu fakta-fakta sosial yang berlangsung di lingkungan yang dikenalinya tetapi dia tidak dapat sepenuhnya berada di dalamnya. Maka Pos Kota dapat menjalanka fungsi sosiologisnya bagi khalayak yang berada di bawah garis tersebut.Tentunya akan sangat menarik jika dapat mengetahui tiras surat kabar ini pada masa arus mudik kaum urbanis dari Metro Jakarta. Selisih angka tiras ini dapat dijadikan dasar dalam melihat betapa berjasanya kaum urbanis ini terhadap Pos Kota. Untuk itu sudah selayaknya sebagai media pers surat kabar ini junga memberikan fakta sosial plus artinya sudah perlu dipertanuyakan apakah cukup hanya dengan memberikan fakta sosia sekadar memenuhi motivasi kaum urbanis ini tanpa berpretensi untuk ikut membentuk budaya metropolitan yang lebih ideal.Suatu media pers dapat hanya menjadi cermin yang memantulkan fakta-fakta soial dari lingkungan sosiologis tertentu dan mempersilahkan khalayaknya untuk menonton fakta sosial tersebut. Tetapi media pers juga dapat menjalankan fungsi yang lebih ideal saat memantulkan fakta sosial dari lingkungan sosiologis khalayaknya untuk bercermin dan memproyeksikan budaya bagi suatu masyarakat metropolitan. (GM. Sudarta 2000:27)

Kondisi kaum urbanis pada tahun 70an tentulah berbeda dengan kondisi sekarang dan kelak. Pos Kota telah menjadi media kaum urbanis tahun 70 sampai 90an. Dia akan memasuki era 2000 dengan pola kehidupan Metro Jakarta yang semakin maju dengan berpikir optimistis kita perlu membayangkan kondisi transportasi yang semakin canggih bis ala metro mini dan kereta listri berjejalan sudah tidak ada. Digantikan oleh transportasi massal cepat degan bis dan kereta api computerized. Dengan begitu kaum urbanis yang menjadi operator semakin tinggi kualifikasinya. Sistem keamanan semakin canggih sehingga pola kejahatan dan penyimpangan sosial akan berbeda dengan yang dikenal sebelumnya. Mana fakta sosial yang dimiliki kelayakan berita tidak lagi sekedar penyimpangan sosial bersifat fisik.(Litbang Pos Kota,2000:90)

Dengan perkembangan zaman masyarakat berubah maka secara otomatis pers pun akan ikut berkembang. Masa di mana Pos Kota berkembang menjadi pers yang memliki format sendiri yang sesuai dengan masyarakat. Dan dimasa depan memiliki format tersendiri. Dengan antisipasi perubahan masyarakat Pos Kota akan bertambah terus umurnya 10 tahun mendatang 20 tahun 30 tahun lagi di tangan generasi baru Pos Kota. Sekaligus doa untuk Pos Kota. Sebuah surat kabar yang dilahirkan untuk lapisan masyarakat yang nyaris terlupakan.

Tidak mengherankan kalau komunitas kelas menengah dan lapis masyarakat elit yang terdidik dan terbiasa membaca koran koran kelas elit seperi Pedoman, Indonesia Raya melihat Pos Kota dengan mata sebelah. Bahkan ada yang menuduh Pos Kota sejeis koran kuning yang mengeksploitir selerah rendah pembacanya dengan mengabaikan salah satu fingsi pokok pers yaitu fungsi mendidik.

Justru menurut Soetjipto Wirosardjono fungsi utama pers yang dijalankan Pos Kota adalah justru fungsi mendidik itu. Pada masyarakat yang pada zaman itu lebih dari 40% penduduknya masih buta huruf atau setengah buta aksara maka fungsi mendidik yang utama dan pertama tama perlu dilakukan adalah menyediakan bahan bacaan yang sesuai dengan kemampuan tingkat inteligensia derajad sofistifikasi informasi dan berisi berita gambar foto dan tulisan pendek-pendek mengenai hal hal yang berkaitan dengan peri kehidupan orang orang kecil dan lingkungan serta kondisi

kehidupannya sehari hari di bidang kepedulian mereka. Kalau sasaran strategis itu sudah dirumuskan maka sasaran taktis rumusannya bisa mengikuti.

Contohnya harga harus terjangkau cara penyebaran dan pemasarannya harus bertumpu pada pembeli eceran. Karena alasan alsan itu sangatlah mudah dipahami kalau definisi pangsa pembaca Pos Kota lalu dapat dipertajam sesuai namanya sebagai koran untuk rakyat pekerja dapis rendah di perkotaan yang jumlahnya merupakan mayoritas penduduk kota Jakarta khususnya

Pos Kota telah menjembatani adanya interaksi positif antara pembacanya yang sebagian bersar wong ciliki itu dengan program program pembangunan yang dilancarkan oleh pemerintah. Khususnya pemerintah lokal dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, Walikota sampai ke Gubernurnya

Perhatikan isi dan kebijaksananya termasuk rubrikasinya isi surat surat dari pembacanya fungsi kontrol sosial utamanya ditujukan pada masalah dang tingkat pemerintahan yang sesuai dengan kepedulian sasaran pembacanya masalah penggusuran, ketenagakerjaan dan sebagainya. Bahkan masalah sesulit inflasi bisa dikemas dengan seksama sesuai dengan perkembangan tingkat kecerdasan pembacanya

4.3.1 Perkembangan Surat Kabar Harian Pos Kota Pada Tahun 1985-2000

Susunan Pengurus Pos Kota pada periode pertengahan 1980an

Pemimpin Umum/Pemimpin Perusahaan	H. Tahar
Pemimpin Redaksi	H. Sofyan Lubis
Wakil Pemimpin Redaksi	H. S. Saiful Rahim
Redaktur Pelaksana	M. Syukri Burhan
Dewan Redaksi	H. Sofyan Lubis, H.S. Saiful Rahim, H. Tahar, A. Husin

(Dikutip dari koran Pos Kota Edisi Kamis, 2 Januari 1986)

Pada masa ini pemimpin redaksi Pos Kota ialah Sofyan Lubis dimulai dari tahun 1983 setelah Harmoko menjadi Menteri Penerangan. Salah satu wartawan senior tujuh zaman yang beliau juga selain pemimpin redaksi juga ketua PWI Pusat pada tahun 1993-1998 serta Anggota DPR dan juga pengurus partai Golkar. Beliau juga tetap mempertahankan pangsa pasar Pos Kota yakni kaum rendahan agar Pos Kota tetap menjadi bacaan menengah kebawah diantaranya berita Kelurahan , RT,RW yang ditonjolkan. Selain itu Pos Kota juga menampung foto-foto kiriman warga rakyat Jakarta yang heterogen. (Wawancaran Dirham Sabirin 2019)

Hal menarik beliau sebagai Ketua PWI Pusat sedangkan pada masa itu menteri penerangannya adalah Harmoko yang membreidel koran Prioritas besutan Surya Paloh pengaruh sebagai PWI Pusat pun tidak mampu untuk membela koran yang di breidel dan akhirnya di cabut SIUPP koran tersebut

Sofyan Lubis bersama Parni Hadi berpasangan menjadi Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PWI periode 1993-1998. Keduanya banyak menghadapi terpaan terkait kemerdekaan pers apalagi saat Pemerintah melalui Menteri Penerangan Harmoko membatalkan SIUPP majalah berita Tempo dan Editor serta tabloid Detik. Sofyan pernah menyatakan posisi PWI terutama dirinya dan Parni Hadi sangat sulit saat Pemerintah membatalkan SIUPP tiga perusahaan pers itu pada 21 Juni 1994. Pasalnya mereka berdua kenal dekat dengan Menteri Penerangan Harmoko yang notabene juga mantan Ketua Umum PWI Pusat. (LPDS,2001:4)

Menurut Majalah Tempo Harmoko ialah album lama yang berdebu banyak pers yang di breidel Seperti Prioritas besutan Surya Paloh, Harian Sinar Harapan Pimpinan H. G. Rorempandey, Tabloid Monitor, Detik, Editor Serta Tempo itu sendiri. Arswendo Atmowiloto pernah mengatakan bahwa membuat SIUPP itu mudah pada zaman Orde Baru pada pertengahan 1980-an Arswendo Atmowiloto menjadi tamu penting Harmoko setiap bulannya. Dia mengatakan membawa uang setoran puluhan juta rupiah untuk Menteri Penerangan. Istilah yang digunakan Arswendo Atmowiloto adalah Uang Lelaki mengutip istilah yang dipakai Harmoko. Pernah suatu kali Arswendo Atmowiloto membawa uang tunai 50 juta rupiah kontan di dalam tas. Namun hal ini di bantah habis-habisan oleh Harmoko dalam wawancara ekslusif Tempo beliau mengatakan bahwa itu fitnah dan tidak benar dan mengatakan bahwa ia masih menjunjung tinggi moral.(Majalah Tempo,2003)

Pos Kota sendiri pada masa Orde Baru tetap sebagai Harian Independent dan bersifat lokal selalu memberitakan berita tentang masyarakat ibukota masalah perkotaan serta kriminalitas dan tidak pernah membahasa tentang politik kecuali Pos Kota banyak memberitakan politik saat Indonesia dalam keadaan genting dan urgensi yang membuat Pos Kota memberitakan hal tersebut.

Berita-berita aksi demonstrasi mahasiswa untuk menggulingkan rezim Orde Baru mendapat tempat utama di halaman muka sepanjang bulan Mei 1998 Demikian pula berita-berita kritis yang mengoreksi kekuasaan otoriter ketika itu memperoleh prioritas pemuatannya di Pos Kota. Dengan tampilan sajian berita-berita aktual bernuasa politis seperti kita lihat dimulai dari edisi 1 Mei 1998 tentang kasus orang hilang *Kabakin: Dibicarakan dalam Rakor Polkam* dengan sub judul *Dibentuk tim mengusut kasus orang hilang* setelah itu pada tanggal 2 Mei 1998 *Presiden ketika silaturahmi dengan pimpinan DPR* dan sub judul *Reformasi oke, setelah tahun 2003* namun berita itu buru-buru di revisi pada tanggal 3 mei 1998 *Pemerintah meluruskan pemberitaan pernyataan Presiden* dengan sub judul *Tidak betul reformasi harus setelah 2003* dan juga mulai mengkritis pemerintah lewat keluhan masyarakat yang terlihat dari edisi 5 mei 1998 *Antrean mobil di pompa bensin memacetkan lalu lintas*

dengan sub judul *Tarif BBM, listrik dan angkutan naik* serta pernyataan Harmoko *Ketua DPR/MPR Harmoko tegaskan: Aksi keprihatinan kampus positif.*

Pada tanggal 6 Mei 1998 melanjutkan halaman atas berita yang kemarin *Terjadi di seluruh Jabotabek dan sejumlah daerah* dengan subjudul *Penumpang tolak tarif baru angkot dan mikrolet mogok* serta lanjutan aksi mahasiswa *Mahasiswa makin marak tuntu Reformasi Kenaikan BBM & listrik jadi pemicu* dan pada tanggal 7 mei 1998 pernyatan menkopolkam *Menko Polkam: Asal dilakukan di dalam kampus* dengan subjudul *ABRI tak larang aksi Mahasiswa* serta berita mahasiswa tentang korban kekerasan *Membawa puluhan selongsong peluru & baju berdarah 16 Mahasiswa UMB ke Komnas HAM* pada tanggal 8 mei 1998 kembali pernyataan pejabat pemerintahan *Menhankam/Pangab: Dijadikan agenda nasional* dengan subjudul *ABRI setuju reformasi* dan mahasiswa pun tetap konsisten aksi bisa dilihat di berita *Jalan Jakarta-Bogor ditutup selama 3 jam Ribuan mahasiswa bentrok dengan aparat* dan *Kesehatan 2 mahasiswa mogok makan menurun 'Saya tetap nekat, meski harus mati'* tanggal 9 mei giliran penyataan DPR *Kami atau jajaran kabinet yang mundur* dengan subjudul *DPR:Cabut Keppres kenaikan BBM dan listrik* dan berita mahasiswa *Mulut ditutup potongan kain warna-warni 500 Mahasiswa aksi diam di DPR* pada tanggal 10 Mei 1998 pun angkat bicara *Presiden: Supaya stabilitas dapat dipelihara* dan *Saya tenang tinggalkan Tanah Air.*

Puncak dari serangkaian peristiwa yang di beritakan Pos Kota pada tanggal 13 Mei 1998 *Pimpinan Universitas Trisakti Sesalkan Tindakan Petugas* dengan subjudul *Mahasiswa Tewas Dalam Unjuk Rasa* dan berita haru keluarga korban mahasiswa yang terbunuh *Hujan Tangis di RS Sumber Waras 'Elang,Mama Tak Bisa Terima'*. Buntut dari kematian Elang Mulia Lesmana mahasiswa Universitas Trisakti pada berita 14 Mei 1998 *MAHASISWA TAHLILAN MASSAL* dengan subjudul *Ratusan Mobil, Pom Bensin, Pos Polisi Dibakar* serta berita berita kematian mahasiswa *Selamat Jalan 'Pahlawan2 Reformasi', Pangab: Akan ditindak tegas DPR: Usut Insiden Trisakti, Amien dan Mega hadir di Trisakti*. Begitu juga berita pada 15 Mei 1998 *KERUSUHAN MAKIN HEBAT* dengan subjudul *Tewas, Ratusan Mobil dibakar, toko2 hancur* serta

berita *Trisakti tunjukkan peluru tajam* dan berita kerusuhan pada 16 Mei 1998 *1.202 PENJARAH DIAMANKAN* dengan subjudul *Ratusan Warga Tewas Terpanggang* dan adanya berita tentang presiden *Pak Harto tidak mengatakan siap mundur*, *Wapres dan beberapa menteri dipanggil Presiden minta laporan situasi*. Situasi juga semakin tidak kondusif dilihat dari berita 17 Mei 1998 *PRESIDEN ROMBAK KABINET* dengan subjudul *Lagi, Ratusan Mayat Terpanggang Ditemukan*. Juga pada 18 Mei 1998 *KORBAN2 KERUSUHAN DIKUBUR MASSAL*.

Hal yang paling menghebohkan pada berita 19 Mei 1998 *Harmoko dan Para Wakil Ketua DPR Minta:* dengan subjudul *PAK HARTO AGAR MUNDUR* serta berita dari militer *ABRI sarankan bentuk Dewan Reformasi* dan berita mahasiswa *200 Orang bertahan dalam tenda darurat Ribuan Mahasiswa 'Serbu' DPR/MPR*. Serta berita tanggapan Amien Rais *Amien Rais: Rakyat Pasti Beri Maaf*. Adapun berita pada 20 Mei 1998 *PEMILU DILAKSANAKAN SECEPATNYA PAK HARTO TIDAK MAU DICALONKAN* namun Harmoko mendesak Presiden Soeharto mundur *Harmoko: Mengundurkan Diri Juga Konstitusional*. Serta mahasiswa juga berhasil menduduki gedung DPR *Ribuan Mahasiswa Bertahan Hingga Malam Gedung DPR 'Diduduki' Dengan Damai* serta berita *Tokoh Masyarakat yang Diundang ke Istana Negara Sebetulnya Semua Minta Presiden Mundur*. Begitupun berita pada 21 Mei 1998 *FKP, FPP, FPDI DESAK SIDANG ISTIMEWA PAK HARTO TETAP DI MINTA MUNDUR* dan juga berita *Mahasiswa Beri Tempo Sampai Jum'at*.

Akhirnya berita mundurnya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 *Pernyataan Berhenti HM Soeharto Disambut Gembira dan Sujud Syukur* dengan subjudul *MAHASISWA MASIH DUDUKI GEDUNG DPR* serta berita pidato Presiden Habibie *Pidato Pertama Presiden BJ Habibie Akhiri Pertentangan di Antara Kita*. Serta berita berita tanggapan Soeharto mundur dari kursi Presiden *Pulang menggunakan Sedan Mercy B 2044 AR, Golkar: Keputusan HM Soeharto Cerminkan Sifat Kenegarawanan, Dewan akan melihat kabinet pemerintahan baru Harmoko: Reformasi tak boleh berhenti, ABRI tetap jaga keselamatan Pak Harto Beserta Keluarga*.

Pada akhir 1990an Pos Kota memiliki banyak Wartawan daripada pertengahan 1980an dengan berkembangnya Oplah Pos Kota serta sebagai koran lokal nomer 1 di Jakarta pada tahun awal tahun 2000an hingga menembus 500.000 eksemplar/hari menurut Nielsen Research Indonesia.

Susunan Pengurus Pos Kota akhir 1990-an

Pemimpin Umum/Pemimpin Perusahaan	H. Tahar
Pemimpin Redaksi	H. Sofjan Lubis
Wakil Pemimpin Redaksi	H.M. Syukri Burhan
Redaktur Pelaksana	Gunarso TS, H. Nazarudin
Asisten Redpel	Didi Karpadi, Gunawan Eko Prabowo
Redaktur	H. Delly Ananda, Sakti Sawung Umbaran, Rahmat Satria, Binsar Aritonang, H. Soesilo Ar, H. Sugeng Indarto, H.M. Dirham Sabirin, H. Kelik Siswoyo, Rafles Lesmana, Toto Irianto, Karlina Amkas

(Dikutip dari koran Pos Kota Edisi Jum'at, 7 Juli 2000

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Perkembangan surat kabar harian Pos Kota memiliki tiga periode yakni:

1. Pos Kota didirikan oleh Harmoko dan kawan kawan sebagai media alternatif dari media mainstream di Indonesia berbeda dengan koran lainnya yang hanya berfokus pada berita politik dan ideologi Pos Kota sendiri adalah koran lokal dan koran populer pertama di Jakarta dan bahkan di Indonesia sebagai pelopor utama tentu memiliki banyak rintangan dan tantangan di awal pembentukan surat kabar harian Pos Kota. Dari dipandang sebelah mata oleh pers lain hingga susah laku di masa awal-awal pendirian. Pada 15 April 1970 Pos Kota terbentuk.

2. Pos Kota dalam proses berdirinya memiliki pasang surut setelah diajukan untuk membuat surat kabar harian yang bergenre koran populer ide itu malah tenggelam lama hingga akhirnya Harmoko dan kawan kawan menemukan momen disaat para pendiri sepakat mendirikan Yayasan Antar Kota pada tahun 5 Februari 1970 untuk menerbitkan buku buku maupun karya sastra maka terbentukan surat kabar harian Pos Kota pada tahun 15 April 1970. Yachya Suryawinata menjadi Pemimpin Umum dan Harmoko menjadi Pemimpin Redaksi
3. Dalam perkembangan selanjutnya Pos Kota membawa perubahan besar bagi pers di Jakarta bahkan di Indonesia karena Pos Kota sebagai pelopor koran populer hingga hari ini banyak yang mengikuti jejak Pos Kota sehingga masyarakat awam dan menengah kebawah dapat mendapatkan informasi sesuai dengan daya menangkap berita yang disajikan. Namun tidak hanya berita populer yang diberitakan oleh Pos Kota tetapi juga berita politik yang muatanya tetap perkotaan dan kriminalitas seperti halnya reformasi 1998 Pos Kota juga memuat halaman depan di urutan paling atas tentang peristiwa reformasi. Tetapi pada Headline Pos Kota tetap konsisten memberitakan berita populer bahkan jurnalisme kuning.

5.2 Saran

Pertama, semoga tulisan ini bisa menjadi bahan bacaan untuk menambah pengetahuan kita tentang sejarah pers pada umumnya dan Pos Kota khususnya sebagai koran populer pertama di Jakarta dan Indonesia. Sehingga dengan adanya para pemuda pemudi yang tertarik dengan pers umumnya dan surat kabar khususnya dapat terpantik dan ingin mencari tau lebih dalam apapun tentang dunia pers.

Kedua, hendaknya penulisan sejarah Pos Kota ini tetap berlanjut agar kedepannya masyarakat pembaca Pos Kota umumnya dan lingkungan internal Pos Kota sendiri khususnya lebih mengenali sejarah Pos Kota itu sendiri

Ketiga, dengan adanya penelitian tentang sejarah pers ini diharapkan memacu untuk peminat sejarah pers untuk menuliskan sejarah-sejarah pers lainnya yang belum terdokumentasikan karena yang menjadi unik surat kabar selalu mendokumentasikan peristiwa penting apapun dengan baik tapi surat kabar tidak cukup baik untuk mendokumentasikan perjalanan dirinya sendiri sebagai surat kabar.

Keempat, semoga pemerintah lebih memfasilitasi lagi semua penelitian sejarah, menghargai dan mengapresiasi karena sejatinya sejarah sendiri adalah komponen utama dalam mengisi nilai nilai kebangsaan agar kita menjadi bangsa yang pembelajar dan mengerti intisari yang sudah dilalui oleh pendahulu kita sebagai pejuang,pelopor dan pembebas.

Perkembangan Surat Kabar Harian Pos Kota Di Kota Jakarta Tahun 1970-2000

ORIGINALITY REPORT

20%	18%	2%	3%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	file.upi.edu Internet Source	5%
2	senandika.web.id Internet Source	2%
3	hindasah19.blogspot.com Internet Source	2%
4	Abdul Malik. "Jurnalisme Kuning, ‘Lampu Kuning’ Etika Komunikasi Massa", Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum, 2018 Publication	2%
5	text-id.123dok.com Internet Source	2%
6	officialtamsq.blogspot.com Internet Source	1%
7	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%
8	repository.unhas.ac.id Internet Source	1%

9	lpds.or.id Internet Source	1 %
10	id.123dok.com Internet Source	1 %
11	www.harianposkota.com Internet Source	1 %
12	edoc.pub Internet Source	1 %
13	eprints.undip.ac.id Internet Source	1 %
14	nasional.kompas.com Internet Source	1 %
15	Submitted to Udayana University Student Paper	1 %

Exclude quotes	On	Exclude matches	< 1%
Exclude bibliography	On		